

III. DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

RENCANA KERJA

DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

KABUPATEN PASURUAN

TAHUN 2026

BAB I

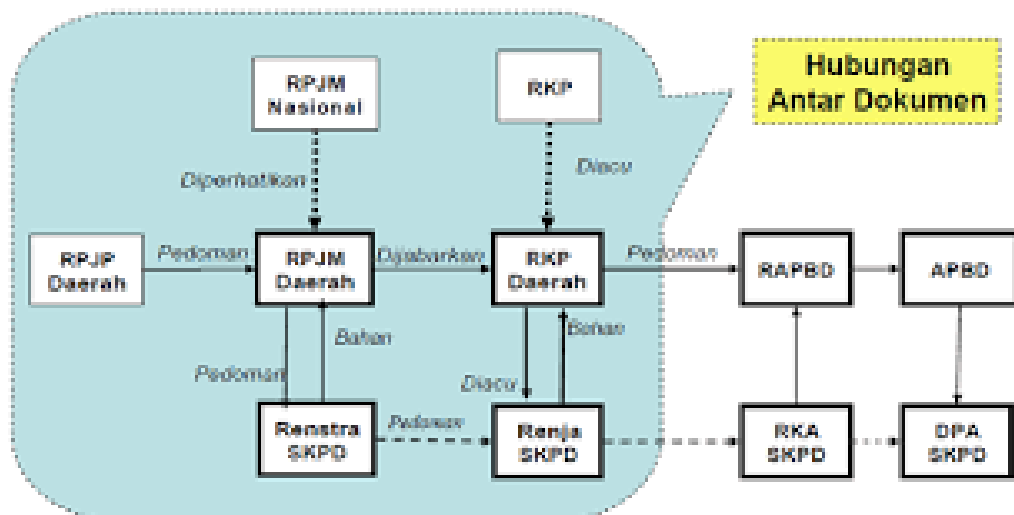
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Rencana Kerja (Renja) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan adalah dokumen perencanaan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, tujuan, sasaran dan program serta kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dari uraian diatas dapat dijabarkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari tujuan, program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 2024-2026 sesuai arahan operasional dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD);
2. Renja merupakan acuan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang untuk memasukan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026;
3. Renja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan OPD untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Dinas , Cipta Karya dan Tata Ruang pada Tahun 2026 dan ini merupakan tahun awal pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 2024 - 2026.

Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan



Penyusunan rancangan Renja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan Renja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan Renja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dapat dikerjakan secara simultan / paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang yang ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 2024-2026, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya dilakukan penyusunan dokumen Renja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum dalam RPJPD Kabupaten Pasuruan 2005-2025 serta RPJMD 2018-2023 Provinsi Jawa Timur.

Adapun penyusunan Renja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup:

1. Tahap Perumusan Rancangan Awal Renja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
2. Tahap Penyajian Rancangan Akhir Renja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;



14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

26. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005 - 2025;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda & Dinas Teknis Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
31. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 192 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 173 Tahun 2021 tentang SOTK Dinas , Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan;
32. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 112 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan 2024-2026;
33. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas , Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 - 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2026 disusun dengan maksud sebagai berikut:

1. Untuk mengimplementasikan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan Rencana Strategis Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2024 - 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
2. Menjadi landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara kronologis dan berkelanjutan;
3. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2026;
4. Melakukan sinkronisasi terhadap program – program dalam RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 sesuai dengan tujuan RPD Kabupaten

Pasuruan Tahun 2026 yaitu **“PPD 2 : Peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas bahan baku dan PPD 3 : Pengembangan industri Pengolahan unggulan Daerah dan Hasil Produksi yang kompetitif”** dengan mengutamakan pengaruh isu - isu strategis pada Tahun 2026.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2026 adalah sebagai acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang pada Tahun 2026 dengan tetap memperhatikan RPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2026, meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang agar substansi pada bab - bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Menguraikan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, proses penyusunan Renja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, keterkaitan antara Renja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dengan dokumen RKPD Kabupaten Pasuruan, Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, dengan Renja K/L dan Renja Dinas PU Propinsi Jawa Timur, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang tahun - tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, serta ketentuan peraturan perundangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan;
 5. Formulasi isu - isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- Berisikan uraian mengenai:
1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
 2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
 3. Penjelasan temuan - temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda;
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, Asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang yang langsung ditujukan kepada Dinas PU Provinsi Jawa Timur dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi, penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :
Jumlah program dan jumlah kegiatan; sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu); total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Pasuruan, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

5.1. Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

5.2. Kaidah - kaidah pelaksanaan

5.3. Rencana tindak lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2025 dan Pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2024-2026 terhadap isu - isu strategis pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sesuai dengan penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yaitu :

- a. Tingkat pelayanan kebutuhan air baku masih perlu ditingkatkan ;
- b. Pengelolaan belum optimal ;
- c. Pemenuhan kebutuhan tenaga lapangan/juru pengairan yang minim ;
- d. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang peraturan ;
- e. Masih tingginya kejadian bencana alam, banjir dan kekeringan ;
- f. Upaya mempertahankan lingkungan (konservasi) perlu ditingkatkan ;
- g. Perencanaan antisipatif dan pembangunan partisipatif ;
- h. Upaya pemanfaatan dan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang belum optimal ;
- i. Pelayanan keciptakaryaan terkait SPAM, Air Limbah, Persampahan dan Tata Bangunan terhadap masyarakat perlu ditingkatkan.

Sampai dengan akhir Tahun 2024, realisasi belanja operasi (belanja pegawai dan belanja barang dan jasa) dan belanja modal (belanja modal peralatan dan mesin; belanja modal gedung dan bangunan; belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; belanja modal asset tetap lainnya) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp. 87.433.382.025,00 (*Delapan puluh tujuh milyar empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua puluh lima rupiah*) atau 82,70% dari keseluruhan anggaran belanja yang tersedia sebesar Rp. 105.726.698.502,00 (*Seratus lima milyar tujuh ratus dua puluh enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus dua rupiah*) yang bisa dikatakan berhasil.

Dari berbagai isu strategis diatas, ada beberapa sasaran strategis yang telah dicapai, untuk lebih jelasnya dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur Keciptakaryaan” memiliki indikator “Indeks Infrastruktur

Keciptakaryaan” dengan formulasi “Rerata Capaian air minum + capaian sanitasi + capaian gedung” pada tahun 2024 ditargetkan 57,98 dengan realisasi kinerja sebesar 67,69 sehingga prosentase capaian adalah 116,75%.

- b. Sasaran strategis “Terwujudnya ketaatan terhadap rencana tata ruang” memiliki indikator “Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang” dengan formulasi “Luasan pemanfaatan lahan yang sesuai dibanding luasan lahan yang dimohon x 100%” pada tahun 2024 ditargetkan 85% dengan realisasi kinerja sebesar 84,03% sehingga prosentase capaian adalah 98,86%.

Untuk lebih detilnya akan dijelaskan pada ***Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 dan Tabel T 2.1.A Analisis Kinerja Pencapaian Renstra 2024-2026 sampai dengan Tahun 2025*** (terlampir).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang menetapkan 1 tujuan dengan 2 indikator dan 4 sasaran dengan 4 indikatornya. Adapun analisis kinerja pada tahun 2024 dari masing – masing indikator tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang mencapai sebesar 49,51 % dengan rincian target 50 sedangkan realisasi 24,76. Hal ini disebabkan status hukum Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berupa Peraturan Menteri ATR/BPN menyebabkan permasalahan sendiri dalam penyusunan aturan dibawahnya, baik itu perencanaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) maupun dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang, Dimana dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang masih dijumpai adanya pelanggaran akibat minimnya penindakan atas pelanggaran tersebut. Adapun Upaya yang sudah dilakukan adalah melakukan koordinasi baik dengan Menteri ATR/BPN, kemendagri, Propinsi maupun Lembaga lain yang terkait.
- b. Indeks Infrastruktur Keciptakaryaan mencapai 116,75 % dengan rincian target 57,98 dengan realisasi sebesar 67,69. Indeks keciptakaryaan

merupakan rerata dari beberapa program dalam cipta karya, dapat dijabarkan sebagai berikut :

- Capaian Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak sebesar 73,83 %, berarti dari jumlah kepala keluarga (KK) yang ada di Kabupaten Pasuruan sebesar 572.149 KK, ada 422.422 KK yang sudah terlayani terkait pemenuhan SPAM. Di Kabupaten Pasuruan terdapat beberapa desa yang termasuk dalam kategori daerah rawan air, stunting maupun kemiskinan ekstrem dan salah satu upaya untuk mengatasinya adalah dengan pembuatan sumur bor dan didahului dengan tes geolistrik untuk mengetahui potensi air terdapat pada suatu kedalaman;
- Capaian Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi / air limbah domestik (layak & aman) sebesar 69,48 %, berarti dari jumlah kepala keluarga (KK) yang ada di Kabupaten Pasuruan sebesar 572.149 KK, ada 397.524 KK yang sudah terlayani terkait akses sanitasi / air limbah domestic. Sanitasi yang layak adalah yang memenuhi syarat kesehatan antara lain dilengkapi kloset dengan leher angsa dan dengan septic tank pada Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) yang digunakan sendiri atau bersama-sama, Dinas , Cipta Karya dan Tata Ruang dalam hal Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) hanya terbatas dalam pemenuhan sarana prasarana (Pembangunan / Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman) skala yayasan dan pondok pesantren saja, akan tetapi untuk skala komunal (jamban) menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ;
- Capaian Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dg baik di perkotaan sebesar 10,94 %, berarti dari jumlah kepala keluarga (KK) yang ada di Kabupaten Pasuruan sebesar 572.149 KK, ada 62.609 KK yang sudah terlayani terkait akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan. Pemenuhan Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS pada saat usulan Masyarakat, sebelumnya disaring apakah terdapat lahan untuk Pembangunan, sehingga Pembangunan lebih cepat dan tepat. Dinas , Cipta Karya dan Tata Ruang dalam hal persampahan hanya terbatas dalam pemenuhan sarana prasarana (Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS) dan terkait pengelolaan menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup.

- Capaian Persentase Pembangunan Gedung yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sebesar 84,20 % yang dihitung dari banyaknya Gedung yang sudah memiliki sertifikat laik fungsi (SLF) sebanyak 357 dibanding jumlah Gedung yang ber-PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF sebanyak 424 gedung. Hal ini merupakan hasil dari upaya dinas untuk mendorong Masyarakat agar tertib aturan, salah satunya tertib dalam hal pengurusan PBG dan SLF, dan dinas sudah menyediakan pegawai sendiri di Mall Pelayanan Publik agar pelayanan lebih cepat dalam satu pintu pelayanan.
 - Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang mantap sebesar 100%, dimana Kawasan yang dilakukan penataan bangunan dan lingkungan ada 1 dan sudah terealisasi, yakni ibu kota Bangil.
- c. Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang mencapai 98,86 % dengan rincian kinerja yang ditargetkan sebesar 85 dengan realisasi sebesar 84,03. Hal ini disebabkan bahwa luasan lahan yang dimohon tidak sesuai dengan tata ruang yang ditetapkan, sehingga luasan yang disetujui hanya 444,53 Ha dari 528,99 Ha yang diajukan.
- d. Nilai SAKIP PD mencapai 100,37 % dari target 80,5 realisasi sebesar 80,80. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja yang dilakukan oleh Dinas , Cipta Karya dan Tata Ruang dan terus berupaya untuk melakukan perbaikan pada kinerja.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan Pemerintah kepada masyarakat maka setiap Perangkat Daerah termasuk juga Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan perlu melakukan evaluasi dan perbandingan terhadap target - target pelayanan yang telah ditentukan dari Pemerintah Pusat sesuai dengan bidangnya. Target - target tersebut dituangkan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Standart Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Untuk mengetahui suatu instansi pemerintah sudah memenuhi SPM maka diperlukan suatu indikator. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak

dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan / atau manfaat pelayanan.

Di dalam tugas pokok dan fungsinya, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan bidang urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standart Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standart Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka SPM yang menjadi kewenangan pada Dinas , Cipta Karya dan Tata Ruang untuk jenis pelayanan dasar terdiri atas : **“ Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari “** dan **“Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik”**.

Untuk indikator Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari, pada tahun 2024 ditargetkan 2.946 Rumah Tangga yang terlayani dengan angka realisasi capaian 2.946 Rumah Tangga yang sudah terlayani sehingga prosentase capaian sebesar 100 %. Sedangkan indikator Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik, pada tahun 2024 ditargetkan 2.563 Rumah Tangga dengan angka realisasi sebesar 2.563 Rumah Tangga yang terlayani air limbah sehingga prosentase capaian sebesar 100 %.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, IKK Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang terdiri atas: **“Persentase jumlah rumah tangga yg mendapatkan akses thd air minum melalui SPAM jaringan perpipaan & bukan jaringan perpipaan terlindungi thd rumah tangga di seluruh kab/kota”, “Persentase jumlah rumah tangga yg memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik”, “Rasio Kepatuhan IMB Kab /Kota”**.

Indikator Persentase jumlah rumah tangga yg mendapatkan akses thd air minum melalui SPAM jaringan perpipaan & bukan jaringan perpipaan terlindungi thd rumah tangga di seluruh kab/kota, pada tahun 2024 ditargetkan 88,41% dengan angka realisasi capaian 73,80% sehingga prosentase capaian sebesar 83,47%. Hal tersebut disebabkan adanya paket pekerjaan yang putus kontrak akibat alam yang tidak mendukung. Saat

dilakukan pengeboran ternyata tanah berupa batuan, sehingga tidak memungkinkan untuk dilanjutkan atas pekerjaan SPAM.

Indikator Persentase jumlah rumah tangga yg memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik, pada tahun 2024 ditargetkan 81,83% dengan angka realisasi capaian 69,06% sehingga prosentase capaian sebesar 84,39%. Kurang optimalnya capaian air limbah disebabkan kurangnya lahan untuk dilakukan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah untuk komunal.

Sedangkan Indikator Rasio Kepatuhan IMB Kab /Kota, pada tahun 2024 ditargetkan 31,76% dengan angka realisasi capaian 68,85% sehingga prosentase capaian sebesar 216,78%. Capaian tersebut didukung selain adanya kesadaran Masyarakat untuk tertib administrasi, dalam hal ini untuk mendirikan bangunan Gedung harus memiliki persetujuan bangunan Gedung maupun sertifikat laik fungsi juga adanya pegawai sendiri Cipta Karya di Mall Pelayanan Publik untuk memberikan sosialisasi dan pelayanan terkait pengajuan persetujuan bangunan Gedung.

Untuk lebih detilnya akan dijelaskan pada **Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah** (terlampir).

2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pemilihan dan penetapan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang atas dasar analisis terhadap penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum di bidang Keciaptakaryaan dan Penataan Ruang, permasalahan dan isu strategis yang berkembang saat ini dan diperkirakan masih terjadi pada tahun - tahun mendatang. Analisis dilakukan berdasarkan data yang diperoleh baik dari satuan kerja terkait maupun dari sumber lain (data dari BPS Kabupaten Pasuruan) sebagai data sekunder. Analisis berikut ini bersifat prediktif dan antisipatif berdasarkan kondisi yang ada saat ini di Kabupaten Pasuruan. Beberapa permasalahan yang masih dijumpai di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang adalah:

1. Belum optimalnya upaya pemanfaatan dan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang karena masih banyaknya daerah/kecamatan yang belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang.
2. Pelayanan keciaptakaryaan yang meliputi pelayanan perijinan bangunan gedung, penyediaan air minum, penyediaan sarana prasarana

pengolahan air limbah dan sistem persampahan regional masih belum maksimal. Pelaksanaan pelayanan PBG memerlukan sinergitas antara OPD dan stakeholder sehingga nilai capaian dapat memenuhi target. Urusan keciptakarya bidang penyediaan air minum dan pengelolaan air limbah domestik juga memerlukan koordinasi dengan instansi terkait dalam memenuhi target SDG's dan SPM bidang Pekerjaan Umum. Dalam pemenuhan target tersebut, peran serta masyarakat juga diperlukan dalam mendukung melalui PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat).

Dengan adanya beberapa permasalahan diatas, ada isu-isu strategis yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman seluruh stakeholder yang terkait penataan ruang;
2. Meningkatkan pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
3. Mengelola dan mengembangkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional serta meningkatkan kinerja penyelenggaraan SPAM;
4. Mengelola dan mengembangkan Sistem Air Limbah Domestik;
5. Mengembangkan pengelolaan Sistem Persampahan Regional;
6. Meningkatkan pemahaman ke masyarakat tentang pentingnya Bangunan Gedung yang berijin dan memiliki legalitas.
7. Penataan Kota Bangil sebagai Ibu Kota Kabupaten Pasuruan

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Adapun perbandingan antara program dan kegiatan pembangunan di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 yang diusulkan pembiayaannya baik dari anggaran APBD Kabupaten, Propinsi dan dari Pusat baik melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sesuai dengan **Tabel T-C.31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026** (terlampir).

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang pada Tahun 2026 melaksanakan penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang secara langsung menjadi Program dan Kegiatan yang ada di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang menampung usulan masyarakat. Rancangan awal

renja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dilakukan setelah mendapatkan masukan dari usulan masyarakat melalui musrenbang desa/kelurahan dan tingkat kecamatan. Hasil masukan dari masyarakat tersebut diurutkan berdasar kriteria prioritas dan disinkronkan dengan usulan program/kegiatan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang melalui forum OPD yang telah dijadwalkan. Dan sesudahnya usulan-usulan tersebut dilakukan pembahasan pada pelaksanaan Musrenbang Kabupaten dengan dibuatkan berita acara hasil Musrenbang sesuai ***Tabel T-C.32 Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026*** (terlampir).

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program/kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi pemerintah, dalam hal ini Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.

Merujuk pada Astacita Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabumingraka, dimana Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang mendukung dua dari delapan asta cita tersebut, yakni yang pertama memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru, sedangkan yang kedua yakni meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Tahun 2030 bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. SDGs memiliki 17 tujuan, yaitu (1) Tanpa kemiskinan; (2) Tanpa kelaparan; (3) Kehidupan sehat dan sejahtera; (4) Pendidikan berkualitas; (5) Kesenjangan gender; (6) Air bersih dan sanitasi layak; (7) Energi bersih dan terjangkau; (8) Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya kesenjangan; (11) Kota dan permukiman yang berkelanjutan; (12) Konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab; (13) Penanganan perubahan iklim; (14) Ekosistem lautan; (15) Ekosistem daratan; (16) Perdamaian, keadilan dan kelambagaan yang tangguh; (17) Kemitraan untuk mencapai tujuan. Dari 17 tujuan tersebut, kewenangan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

memiliki kewenangan dalam hal penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak, mendukung pertumbuhan ekonomi industri dan infrastruktur.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, kewenangan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang meliputi:

- Kabupaten Pasuruan termasuk dalam WPPI (Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri) sehingga untuk mendukung investasi yang masuk, proses perijinan Bangunan Gedung yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang harus dioptimalkan.
- Kabupaten Pasuruan termasuk dalam Kawasan Prioritas Bromo-Tengger-Semeru, sehingga diperlukan peran aktif Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dalam penyediaan sarana prasarana pengelolaan air limbah domestik, persampahan regional dan penyediaan air minum.
- Pengembangan Agropolitan Tosari-Tutur-Puspo-Purwosari dan Wonosari-Andonosari dengan penyusunan dokumen RTBL sehingga dapat mendukung peningkatan pengembangan Kawasan Agropolitan tersebut.

Kebijakan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sedapat mungkin selaras dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten bahkan dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Kebijakan (umum) Kepala Dinas yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan aparatur yang berkualitas dan profesional;
2. Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai;
3. Menyusun tata laksana dinas;
4. Perencanaan program kegiatan sesuai dengan kondisi yang ada dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan;
5. Mengembangkan jaringan informasi dan pelaksanaan pengelolaan aset;
6. Laporan evaluasi pelaksanaan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang ada.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2026

Tujuan Renja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai kewajiban untuk mendukung dan ikut bertanggung jawab atas tercapainya tujuan Pemerintah Kabupaten yang menjadi fungsi / bidang kewenangannya.

Tujuan dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang adalah **“Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Keciaptakaryaan dan Penyelenggaraan Penataan Ruang”**. Dengan deskripsi tujuan perangkat daerah diatas maka yang menjadi indikator tujuan adalah:

1. Indeks Infrastruktur Keciaptakaryaan dihitung dari rerata dari capain $(SPAM + Limbah + Gedung) \times 100 \%$ (SPAM dan Limbah di hitung dari jumlah RT yang terlayani dibanding jumlah RT keseluruhan)
2. Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang (Formulasinya adalah Dihitung dari Rencana Tata Ruang yang sudah ditetapkan, pemanfaatan ruang yang diterbitkan dan pelaksanaan monitoring pemanfaatan ruang).

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan perangkat daerah, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam jangka waktu tertentu (1 tahun).

Adapun Sasaran yang ingin dicapai dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan adalah:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur Keciaptakaryaan;
2. Terwujudnya Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang;
3. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah.

Sasaran yang efektif memiliki kriteria SMART (*Spesific, Measurable, Achievable, Relevant, Time Bound*). *Spesific* dimaksudkan bahwa sasaran harus menggambarkan hasil spesifik yang diinginkan, memberikan arah dan tolok ukur yang jelas sehingga dapat dijadikan landasan untuk menyusun strategi dan kegiatan yang juga spesifik. *Measurable* dimaksudkan bahwa sasaran harus terukur dan dapat dipergunakan untuk memastikan apa yang akan dicapai dan kapan. *Achievable* maksudnya target sasaran dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya

yang ada. *Relevant* artinya mencerminkan keterkaitan antara target sasaran dengan tujuan. *Time Bound* adalah sasaran harus dapat dicapai dalam waktu yang relatif pendek yang biasanya kurang dari setahun.

Sedangkan indikator sasaran strategis atau Indikator Kinerja Utama perangkat daerah, adalah :

1. Persentase pengelolaan dan pengembangan SPAM dan air limbah domestik
2. Persentase Penataan Bangunan Gedung
3. Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang
4. Nilai SAKIP PD

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, antara lain:

- Beberapa target dan pencapaian arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, yaitu peningkatan layanan air minum dan sanitasi aman; penghapusan kemiskinan ekstrem; program prioritas mendukung arah kebijakan pembangunan dan proyek strategis;
- Penanganan stunting secara komprehensif terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana penunjang kebutuhan dasar.

Program dan kegiatan prioritas Tahun 2026 (sesuai dengan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Program** Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, **Kegiatan** Pengelolaan & Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kab/Kota dan **Sub Kegiatan** Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan, **Sub Kegiatan** Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan dan **Sub Kegiatan** Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan;

- **Program** Penataan Bangunan Gedung, **Kegiatan** Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kab/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung dan **Sub Kegiatan** Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota dan **Sub Kegiatan** Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah kabupaten/kota;
- **Program** Penataan Bangunan dan Lingkungannya, **Kegiatan** Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kab / Kota dan **Sub Kegiatan** Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota dan **Sub Kegiatan** Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya.

Selain program, kegiatan dan sub kegiatan diatas yang menjadi prioritas Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang serta untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah terbagi ke dalam urusan wajib. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang termasuk dalam Urusan Wajib Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dijabarkan berikut ini:

1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Dengan indikator program: *“Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang”*. Adapun rincian kegiatan serta sub kegiatan sebagai berikut:

1.1 Kegiatan: Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten / Kota. Adapun sasaran dari kegiatan diatas adalah *“Meningkatnya Jumlah Rencana Tata Ruang (RTR) yang ditetapkan sesuai ketentuan”* dengan indikator kegiatan: *“Persentase RTR (RTRW dan RDTR) yang ditetapkan”*. Dari kegiatan diatas, dirinci menjadi beberapa sub kegiatan, antara lain:

- 1.1.1 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten / Kota;
- 1.1.2 Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota;
- 1.1.3 Penetapan RDTR Kabupaten/Kota;

- 1.1.4 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang.
- 1.2 Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten / Kota. Adapun sasaran dari kegiatan diatas adalah *“Meningkatnya kualitas RTR yang disusun”* dengan indikator kegiatan: *“Persentase Rencana Tata Ruang yang disusun”*. Dari kegiatan diatas, dirinci menjadi beberapa sub kegiatan, antara lain:
 - 1.2.1 Penyusunan Peta Dasar;
 - 1.2.2 Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota;
 - 1.2.3 Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang;
 - 1.2.4 Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota.
- 1.3 Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten / Kota. Adapun sasaran dari kegiatan diatas adalah *“Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi Pemanfaatan Ruang”* dengan indikator kegiatan: *“Jumlah koordinasi yang dilaksanakan”*. Dari kegiatan diatas, dirinci menjadi beberapa sub kegiatan, antara lain:
 - 1.3.1 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 - 1.3.2 Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - 1.3.3 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang.
- 1.4 Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kab/Kota. Adapun sasaran dari kegiatan diatas adalah *“Meningkatnya Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang”* dengan indikator kegiatan: *“Prosentase Pengendalian Pemanfaatan Ruang Yang dilaksanakan”*. Dari kegiatan diatas, dirinci menjadi beberapa sub kegiatan, antara lain:
 - 1.4.1 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang;
 - 1.4.2 Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK;
 - 1.4.3 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang.
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Dengan indikator program: *“Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak”*. Adapun rincian kegiatan serta sub kegiatan sebagai berikut:

- 2.1 Kegiatan: Pengelolaan & Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator kegiatan: *“Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak”*. Dari kegiatan diatas, dirinci menjadi beberapa sub kegiatan, antara lain:
 - 2.1.1 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - 2.1.2 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - 2.1.3 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan;
 - 2.1.4 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan;
 - 2.1.5 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan.
3. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional.
Dengan indikator program: *“Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dg baik di perkotaan”*. Adapun rincian kegiatan serta sub kegiatan sebagai berikut:
 - 3.1 Kegiatan: Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Di Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator kegiatan: *“Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dg baik di perkotaan”*. Dari kegiatan diatas, dirinci menjadi beberapa sub kegiatan, antara lain:
 - 3.1.1 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS;
 - 3.1.2 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan;
 - 3.1.3 Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS;
 - 3.1.4 Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS.
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.
Dengan indikator program: *“Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi/air limbah domestik (layak & aman)”*. Adapun rincian kegiatan serta sub kegiatan sebagai berikut:
 - 4.1 Kegiatan: Pengelolaan & Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kab/Kota, dengan indikator kegiatan: *“Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses*

sanitasi/air limbah domestik (layak & aman)“. Dari kegiatan diatas, dirinci menjadi beberapa sub kegiatan, antara lain:

- 4.1.1 Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT);
- 4.1.2 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman;
- 4.1.3 Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman;
- 4.1.4 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja;
- 4.1.5 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD);
- 4.1.6 Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT);
- 4.1.7 Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja;
- 4.1.8 Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat;
- 4.1.9 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD);
- 4.1.10 Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja.

5. Program Penataan Bangunan Gedung.

Dengan indikator program: *“Persentase Bangunan Gedung yang Laik Fungsi”*. Adapun rincian kegiatan serta sub kegiatan sebagai berikut:

- 5.1 Kegiatan: Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, dengan indikator kegiatan: *“Persentase Bangunan Gedung yang Laik Fungsi”*. Dari kegiatan diatas, dirinci menjadi beberapa sub kegiatan, antara lain:
- 5.1.1 Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota;
 - 5.1.2 Pemeliharaan, Perawatan dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota;
 - 5.1.3 Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
 - 5.1.4 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota;
 - 5.1.5 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota;
 - 5.1.6 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan

Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG.

6. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya.

Dengan indikator program: *“Persentase bangunan yang sesuai RTBL”*. Adapun rincian kegiatan serta sub kegiatan sebagai berikut:

6.1 Kegiatan: Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kab/Kota, dengan indikator kegiatan: *“Persentase bangunan yang sesuai RTBL”*. Dari kegiatan diatas, dirinci menjadi beberapa sub kegiatan, antara lain:

- 6.1.1. Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya;
- 6.1.2. Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota.

Untuk mendukung 6 (enam) program diatas, ada 1 (satu) program penunjang (kesekretariatan), yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota. Indikator yang ingin dicapai adalah *“Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota”*. Adapun rincian kegiatan serta sub kegiatan sebagai berikut:

1.1 Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator kegiatan: *“Persentase perencanaan, penganggaran & evaluasi kinerja yang dilakukan”*. Dari kegiatan diatas, ada beberapa sub kegiatan, antara lain:

- 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- 1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
- 1.1.3 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- 1.1.4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

2.1 Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan indikator kegiatan: *“Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang dilaksanakan”*. Dari kegiatan diatas, ada beberapa sub kegiatan, antara lain:

- 2.1.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- 2.1.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
- 3.1 Kegiatan: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan indikator kegiatan: *“Persentase administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang dilaksanakan”*. Dari kegiatan diatas, ada beberapa sub kegiatan, antara lain:
 - 3.1.1 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.
- 4.1 Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan indikator kegiatan: *“Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang dilaksanakan”*. Dari kegiatan diatas, ada beberapa sub kegiatan, antara lain:
 - 4.1.1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan;
 - 4.1.2 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.
- 5.1 Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan indikator kegiatan: *“Persentase penyediaan administrasi umum yang dilaksanakan”*. Dari kegiatan diatas, ada beberapa sub kegiatan, antara lain:
 - 5.1.1 Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 5.1.2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
 - 5.1.3 Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - 5.1.4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- 6.1 Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan indikator kegiatan: *“Persentase pengadaan barang milik daerah yang dilakukan”*. Dari kegiatan diatas, ada beberapa sub kegiatan, antara lain:
 - 6.1.1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - 6.1.2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 6.1.3 Pengadaan Alat Besar;
 - 6.1.4 Pengadaan Mebel;
 - 6.1.5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- 7.1 Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan indikator kegiatan: *“Persentase penyediaan jasa*

penunjang OPD yang dilakukan". Dari kegiatan diatas, ada beberapa sub kegiatan, antara lain:

- 7.1.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- 7.1.2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- 7.1.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

8.1 Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan indikator kegiatan: *"Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang dilakukan"*. Dari kegiatan diatas, ada beberapa sub kegiatan, antara lain:

- 8.1.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- 8.1.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- 8.1.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar;
- 8.1.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor & Bangunan Lainnya;
- 8.1.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

- Lokasi program dan kegiatan tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas kegiatan yang direncanakan ada 8 (delapan) Program dan 20 (dua puluh) kegiatan dan 72 (tujuh puluh dua) sub kegiatan.

- Adapun rekapitulasi estimasi anggaran untuk belanja program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun 2026 di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar :

✓ Belanja Operasi, dengan rincian :

➤ Belanja Pegawai	Rp.	9.796.424.000
➤ Belanja Barang dan Jasa	Rp.	8.440.310.680
➤ Belanja hibah	Rp.	22.813.384.474
✓ <u>Belanja Modal</u>	Rp.	<u>2.250.000.000</u>
✓ Jumlah Total Belanja	Rp.	43.300.119.153,4

- Dari total estimasi anggaran Tahun 2026 diatas dibedakan dengan sumber dana sebagai berikut (**rincian pada Tabel 3.3**) :



✓ Dana Alokasi Umum (DAU)	Rp.	17.103.434.000,00
✓ Dana Alokasi Umum (DAU) bid.Kesehatan	Rp.	299.800.000,00
✓ Dana Alokasi Umum (DAU) bid. PU	Rp.	6.808.038.800,00
✓ Pajak Air Tanah	Rp.	2.473.199.353,40
✓ Pajak Rokok	Rp.	16.615.647.000,00
✓ DAK	Rp.	4.099.598.000,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah berisi program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah tahun ke-*n* dilengkapi dengan indikator outcome / output dan rencana pendanaan. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan seperti ***Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027*** (terlampir) :

BAB V

PENUTUP

1. Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang ini didalamnya dirumuskan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang berdasarkan program, kegiatan sub kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2026. Didasarkan pada analisa gambaran pelayanan kinerja Perangkat Daerah; dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, termasuk analisa terkait kebutuhan dan ketersediaan anggaran melalui mekanisme penentuan prioritas daerah, dan prioritas perangkat daerah.
2. Selanjutnya setelah Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang ditetapkan, menjadi pedoman Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dalam menyusun RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang :
 - a. Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian / penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah mengambil Langkah - langkah penyempurnaan agar penyusunan RKA Perangkat Daerah sesuai dengan Renja Perangkat Daerah. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pemantauan dan supervisi kepada bupati melalui Kepala Bappelitbangda (*Pasal 291 dan Pasal 292 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017*).



- b. Hasil pemantauan dan supervisi, digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program – kegiatan – sub kegiatan, lokasi, dana indikatif dan indikator kinerja serta kelompok sasarannya disusun dalam RKA sesuai dengan RENJA Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.

BUPATI PASURUAN,

MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

TELAH DITELITI		
Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekretaris Daerah		
Asisten PKR		
Kepala Bappelitbangda		
Kepala Dinas CITA		
Kabag. Hukum		
Sekretaris Dinas CITA		
Kabid Bappelitbangda		

BAB V

PENUTUP

1. Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang ini didalamnya dirumuskan program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang berdasarkan program, kegiatan subkegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2026. Didasarkan pada analisa gambaran pelayanan kinerja Perangkat Daerah; dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, termasuk analisa terkait kebutuhan dan ketersediaan anggaran melalui mekanisme penentuan prioritas daerah, dan prioritas perangkat daerah.
2. Selanjutnya setelah Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang ditetapkan, menjadi pedoman Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dalam menyusun RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang :
 - a. Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian / penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah mengambil Langkah - langkah penyempurnaan agar penyusunan RKA Perangkat Daerah sesuai dengan Renja Perangkat Daerah. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pemantauan dan supervisi kepada bupati melalui Kepala Bappelitbangda (*Pasal 291 dan Pasal 292 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017*).



- b. Hasil pemantauan dan supervisi, digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program – kegiatan – sub kegiatan, lokasi, dana indikatif dan indikator kinerja serta kelompok sasarannya disusun dalam RKA sesuai dengan RENJA Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.

Kepala Dinas
Plt. Cipta Karya & Tata Ruang
Kabupaten Pasuruan

SUSANTI EDI PENI,ST
NIP. 197507152006042026

TELAH DITELITI :			
Pejabat	Tanggal	Paraf	Catatan
SUNGRAM / JF PERENCANA PD			
SEKRETARIS PD			

TELAH DILAKUKAN VERIFIKASI :

Pejabat	REKOMENDASI		
JF PERENCANA BAPPELITBANGDA			
KABID BAPPELITBANGDA			

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Teori

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

dst

1.3 Maksud

Maksud

perencanaan

Tujuan

-

-

1.4 Sistem

BAB II HASIL

2.1 Evaluasi

Peran

2.2 Analisis

2.3 Isu Isu

2.4 Review

2.5 Penekanan

BAB III TUJUAN

3.1 Telaah

Telaah

penelitian

nasional

Telaah

3.2 Tujuan

3.3 Program

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.3.4

3.3.5

BAB IV RENCANA

BAB V PENUTUP

Note :

- Perangkat Dasar
- Penyusunan
 - 1. Analisis
 - 2. Hasil Evaluasi
- Penamaan dan

Sistematika Dokumen Renja 2026

HULUAN

Belakang

pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah
proses penyusunan Renja Perangkat Daerah
keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD
(prioritas pembangunan dan proyek strategis tahun rencana),
keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat
Daerah
keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan Renja
provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses
penyusunan RAPBD

san Hukum

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Permendagri 104/2018 tentang penilaian dan pemberian penghargaan
dan/atau insentif inovasi daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah

Permendagri 18/2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Permen terkait SPM (sesuai urusan)

Permen teknis lainnya (sesuai urusan)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Perbup Nomor 12 Tahun 2023 Tentang RPD Kab Pasuruan

Perbup SOTK ...

Rancangan Renstra 2025-2029 PD ...

Perbup tentang RKPD 2026

...

ad dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perad penyusunan renja adalah sebagai arah dan acuan dalam evaluasi canaan dan penganggaran di perangkat daerah

n adalah langkah atau cara untuk mencapai maksud

Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan PD untuk mewujudkan tujuan dan sasaran PD

Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)

atika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, ser

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

asi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra gkat Daerah

Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025

Tabel T 2.1.A Analisis Kinerja Pencapaian Renstra 2024-2026 sampai dengan Tahun 2025

sis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

analisis per indikator (capaian, permasalahan dll)

Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

u Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu terkait TUSI

Keterkaitan dengan prioritas pembangunan tahun 2026

Keterkaitan dengan Proyek Strategis

Keterkaitan Renja dengan IK RPJPD

w terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel T-C.31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026

aahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel T-C.32 Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

AN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

an terhadap Kebijakan Nasional

an terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu

aahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan

aal dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

1 keterkaitan terhadap IK RPJPD

n dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tabel 3.2.A Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tabel 3.2.B Sinkronisasi IKD dan IKU

am, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :

Jumlah program dan jumlah kegiatan.

Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu)

Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

Pemetaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Tabel 3.3.1 Pemetaan Nomenklatur SIPD

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Prioritas Daerah Tahun

Tabel 3.3.2

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Proyek Strategis (jika ada)

Tabel 3.4 Matrik Perencanaan Pembangunan Tahunan pada RKPD Tahun 2024-2026

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Inovasi Perangkat Daerah

semua inovasi (mulai level rintisan sampai dengan penerapan)

Tabel 3.5 Program Pendukung Inovasi Perangkat Daerah

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung IK RPJPD

Tabel 3.6 Program Pendukung IK RPJPD

ANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

UP

aerah menyusun **rancangan awal** Renja Perangkat daerah paling lambat mir
rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup : (PMDN 86 Tahun 201'
gambaran pelayanan Perangkat Daerah
valuasi renja Perangkat Daerah tahun lalu
bel silahkan disesuaikan sendiri

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Kabupaten Pasuruan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Akhir Periode Renstra 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun n-3 (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 (2025))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
									Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2024)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							sesuai target akhir periode 2026 (bukan target 2026)	tdk perlu diisi			sesuai DPPA 2025		realisasi TB II 2025	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	03				BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	96,3		88,41 %	73,80 %	83,47	90,78 %	73,80	77%
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sambungan rumah air bersih non PDAM yang terbangun (SR)	3500		2075 %	2946 SR	142,46	145,00 SR	2946	84%
1	03	03	2.01	0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	100		100 orang	100 orang	100	0,00 orang	100,00	100%
1	03	03	2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum SPAM	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1		1 dokumen	1 dokumen	100	1,00 dokumen	1,00	100%
1	03	03	2.01	0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	54		0 0	0 0	0	54,00 liter/detik	0,00	0%
1	03	03	2.01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	64		83 liter/detik	83 liter/detik	100	64,00 liter/detik	64,00	100%

1	03	03	2.01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	145		0	0	0	0	0	145,00	SR	0,00	0%
1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dg baik di perkotaan	13,53		12,93	%	10,94	%	84,61	0,00	%	10,94	81%
1	03	04	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dg baik di perkotaan	13,53		12,93	%	10,94	%	84,61	0,00	%	10,94	81%
1	03	04	2.01	0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS 3R/TPS	Kapasitas 3R/TPS yang dibangun TPA / TPST / SPA / TPS-3R / TPS	3		3	ton/hari	3	ton/hari	100	0,00	ton/hari	3,00	100%
1	03	04	2.01	0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	1		1	dokumen	1	dokumen	100	0,00	dokumen	1,00	100%
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi / air limbah domestik (layak & aman)	81,86		81,83	%	69,06	%	84,39	81,84	%	69,06	84%
1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi / air limbah domestik (layak & aman)	81,86		81,83	%	69,06	%	84,39	81,84	%	69,06	84%
1	03	05	2.01	0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	2		2	m3/hari	2	m3/hari	100	2,00	m3/hari	2,00	100%
1	03	05	2.01	0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1		1	dokumen	0	dokumen	0	1,00	dokumen	1,00	100%
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Pembangunan Gedung yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	70,73		60,73	%	84,20	%	138,65	65,73	%	84,20	119%

1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan IMB dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung yang Laik Fungsi	70,73		60,73	%	84,20	%	138,65	65,73	%	84,20	119%
1	03	08	2.01	0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	15		1	bangunan gedung	9	bangunan gedung	900	3,00	bangunan gedung	12,00	80%
1	03	08	2.01	0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	7		3	bangunan gedung	3	bangunan gedung	100	2,00	bangunan gedung	5,00	71%
1	03	08	2.01	0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	16		10	dokumen	11	dokumen	110	4,00	dokumen	15,00	94%
1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	120		120	dokumen	424	dokumen	353,33	90,00	dokumen	514,00	428%
1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang mantap	100		100	%	100	%	100	100	%	100,00	100%
1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan strategis yg di-RTBL-kan	100		100	%	100	%	100	100	%	100,00	100%
1	03	09	2.01	0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	2		0	0	0	0	0	2,00	bangunan	2,00	100%

1	03	09	2.01	0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2		1	dokumen	1	dokumen	100	0,00	dokumen	1,00	50%
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) utk perizinan berusaha yg diproses	96		92	%	72,41	%	78,71	90,00	%	90,00	94%
1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW dan Rencana Rinci Tata Ruang RRTR Kabupaten/Kota	1) Persentase rencana tata ruang wil (RTRW) Kab Pas yg ditetapkan ; 2) Persentase rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) yg ditetapkan	100		100	%	0%	%	0	100,00	%	100,00	100%
1	03	12	2.01	0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	4		4	dokumen	0	dokumen	0	4,00	dokumen	4,00	100%
1	03	12	2.01	0008	Pelaksanaan Fasilitas RDTR Kabupaten/Kota	dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitas	4		4	dokumen	0	dokumen	0	4,00	dokumen	4,00	100%
1	03	12	2.01	0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	4		4	dokumen	0	dokumen	0	4,00	dokumen	0,00	0%
1	03	12	2.01	0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	1		4	dokumen	0	dokumen	0	0,00	dokumen	0,00	0%
1	03	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rencana Tata Ruang yang disusun	100		100	%	0,33	%	0,3333	100,00	%	100,33	100%
1	03	12	2.02	0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	4		0	0	0	0	0	0,00	dokumen	0,00	0%
1	03	12	2.02	0006	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	10		10	dokumen	5	dokumen	50	4,00	orang	9,00	90%
1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemanfaatan ruang utk investasi daerah & Pembangunan Daerah	50		50	%	65,69	%	131,38	35,00	%	65,69	131%
1	03	12	2.03	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	100		50	dokumen	60	dokumen	120	24,00	dokumen	60	60%
1	03	12	2.03	0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	10		10	dokumen	0	dokumen	0	6,00	dokumen	6,00	60%
1	03	12	2.03	0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1		1	dokumen	1	dokumen	100	0,00	dokumen	1,00	100%

1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengendalian pemanfaatan ruang yang ditindaklanjuti	100		100	%	0%	%	0	100,00	%	100,00	100%
1	03	12	2.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	12		1	dokumen	0	dokumen	0	6,00	dokumen	6,00	50%
1	03	12	2.04	0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	4		4	dokumen	0	dokumen	0	3,00	dokumen	3,00	75%
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	100		100	%	100	%	100	100,00	%	100	100%
1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan pada dok rencana, anggaran, dan evaluasi	100		100	%	100	%	100	100,00	%	100	100%
1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8		8	dokumen	8	dokumen	100	8,00	dokumen	8	100%
1	03	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2		2	dokumen	2	dokumen	100	2,00	dokumen	2	100%
1	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5		5	laporan	5	laporan	100	5,00	laporan	5	100%
1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	100		100	%	100	%	100	100,00	%	100	100%
1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100		100	orang	100	orang	100	100,00	orang	100	100%
1	03	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	170		170	dokumen	170	dokumen	100	170,00	dokumen	170,00	100%
1	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan / dokumen BMD yg akurat dan sesuai dengan ketentuan	100		100	%	100	%	100	100,00	%	100	100%
1	03	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5		4	dokumen	4	dokumen	100	5,00	dokumen	9,00	180%
1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	100		100	%	100	%	100	100,00	%	100,00	100%

1	03	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	271		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0%
1	03	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50		50	orang	50	orang	100	50,00	orang	50,00	100%
1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	100		100	%	100	%	100	100,00	%	100,00	100%
1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100		3	paket	3	paket	100	100,00	paket	100	100%
1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100		2	paket	2	paket	100	50,00	paket	50	50%
1	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100		100	laporan	100	laporan	100	100,00	laporan	100	100%
1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD	120		70	laporan	70	laporan	100	60,00	laporan	60	50%
1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi	100		100	%	100	%	100	100,00	%	100,00	100%
1	03	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6		8	unit	8	unit	100	1,00	unit	1	17%
1	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3		1	paket	1	paket	100	2,00	paket	2	67%
1	03	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20		30	unit	30	unit	100	8,00	unit	8	40%
1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia	100		100	%	100	%	100	100,00	%	100,00	100%
1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	28		28	laporan	28	laporan	100	28,00	laporan	28	100%
1	03	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100		2	laporan	2	laporan	100	100,00	laporan	100	100%
1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100		15	laporan	15	laporan	100	100,00	laporan	100	100%
1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD kondisi baik	100		100	%	100	%	100	100,00	%	100,00	100%

1	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100		2	unit	2	unit	100	2,00	unit	2,00	2%
1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100		50	unit	50	unit	100	50,00	unit	50,00	50%
1	03	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana & Prasarana Pendukung Gedung Kantor / Bangunan Lainnya yg Dipelihara / Direhabilitasi	100		2	unit	2	unit	100	70,00	unit	72,00	72%

Tabel 2.1.A				
Analisis Kinerja Pencapaian Renstra 2024-2026 sampai dengan Tahun 2025				
Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target capaian renstra s/d Tahun 2025	Perkiraan Capaian Renstra s/d Tahun 2025	Faktor pendorong/ penghambat	Rencana Tindak Lanjut
... diisi program urusan saja .. (tidak termasuk program penunjang)	target renstra 2025 dibagi target akhir periode 2026	... diambil dari tabel T- C.29 kolom 11 ...	lihat simoneva	
		... <100% (tidak memenuhi target)		
		... =100% (memenuhi target)		
		... >100% (melebihi target)		
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	94,27%	77%		
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM di Daerah Kabupaten/Kota	90%	84%		
Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM	0,00%	100%	adanya refocusing anggaran pada th 2025	tidak dilaksanakannya kegiatan

Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum SPAM	100,00%	100%	dokumen RISPAM telah tersusun, namun masih belum bisa ditetapkan menjadi perda dikarenakan masih dalam proses sekoring oleh Balai	Koordinasi dengan Balai
Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	100,00%	0%		
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	100,00%	100%		
Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	100,00%	0%		
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	0,00%	81%	adanya refocusing anggaran pada th 2025	tidak dilaksanakannya kegiatan
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	0,00%	81%	adanya refocusing anggaran pada th 2025	tidak dilaksanakannya kegiatan
Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS 3R/TPS	0,00%	100%	adanya refocusing anggaran pada th 2025	tidak dilaksanakannya kegiatan
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	0,00%	100%	adanya refocusing anggaran pada th 2025	tidak dilaksanakannya kegiatan
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	99,98%	84%		

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	99,98%	84%		
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	100,00%	100%		
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	100,00%	100%		
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	92,93%	119%		
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan IMB dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	92,93%	119%		
Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	20,00%	80%		
Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	28,57%	71%		

Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	25,00%	94%		
Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	75,00%	428%		
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	100,00%	100%		
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	100,00%	100%		
Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	100,00%	100%		

Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	0,00%	50%	adanya refocusing anggaran pada th 2025	tidak dilaksanakannya kegiatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	93,75%	94%	produk hukum dari RTRW yang berstatus Peraturan Menteri menimbulkan masalah sendiri dalam penyusunan perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian pemanfaatan ruang. Hal itu menyebabkan produk hukum dibawahnya tidak bisa dijalankan.	koordinasi dengan kementerian ATR BPN,Kemendagri, Propinsi dan lembaga terkait lainnya
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW dan Rencana Rinci Tata Ruang RRTR Kabupaten/Kota	100,00%	100%		
Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	100,00%	100%		
Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota	100,00%	100%		
Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	100,00%	0%		
Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	0,00%	0%		
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	100,00%	100%		
Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	0,00%	0%	berfokus pada revisi RTRW	Penyusunan revisi RTRW

Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang	40,00%	90%		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	70,00%	131%		
Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	24,00%	60%		
Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	60,00%	60%		
Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	0,00%	100%	adanya refocusing anggaran pada th 2025	tidak dilaksanakannya kegiatan
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	100,00%	100%		
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	50,00%	50%		
Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	75,00%	75%		

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Pasuruan

No	Indikator	SPM/ Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun n-2 (2024)	Tahun n-1 (2025)	Tahun n (2026)	Tahun n+1 (2027)	Tahun n-2 (2024)	Tahun n-1 (2025)	Tahun n (2026)	Tahun n+1 (2027)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
												perbandingan realisasi dengan target tahun tsb/ akhir periode, atau perbandingan dengan standar nasional
	Indikator Tujuan :											
	Indeks Infrastruktur Keciptakarya			67,69	91,10	91,18	91,26	81,87	91,10	91,18	91,26	
	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang			50,00	33,21	33,41	33,61	33,01	33,21	33,41	33,61	
	Indikator Sasaran :											
	Persentase pengelolaan dan pengembangan SPAM dan air limbah domestik				89,76	89,77	89,78	71,65	89,76	89,77	89,78	
	Persentase Penataan Bangunan				92,45	92,60	92,75	92,10	92,45	92,60	92,75	
	Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang				84,23	84,43	84,63	84,03	84,23	84,43	84,63	
	Nilai SAKIP PD				80,90	81,00	81,10	80,80	80,90	81,00	81,10	
		Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari										
		JUMLAH YANG HARUS DILAYANI		11.784	1.016	620	620	11.784	1.016	620	620	
		Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari- hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)		2.946	254	155	155	2.946	254	155	155	
		Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst. (sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023)		2.946	254	155	155	2.946	254	155	155	
		Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik										
		JUMLAH YANG HARUS DILAYANI		10252	96	72	72	10252	96	72	72	

		Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik		2563	24	18	18	2563	24	18	18	
		Ukuran kualitas penyediaan pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar individual dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa yang tersambung ke SPALD-T Kabupaten/Kota		2563	0	0	0	2563	0	0	0	
		Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan > 25 jiwa/hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septic sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala minimal 3 tahun sekali dan diolah di IPLT Kabupaten/Kota		0	0	0	0	0	0	0	0	
		Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan < 25 jiwa/hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar		2563	24	18	18	2563	24	18	18	
			Persentase jumlah rumah tangga yg mendapatkan akses thd air minum melalui SPAM jaringan perpipaan & bukan jaringan perpipaan terlindungi thd rumah tangga di seluruh kab / kota	88,41	94,24	94,25	94,26	73,8	94,24	94,25	94,26	
			Persentase jumlah rumah tangga yg memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	81,83	85,27	85,28	85,29	69,06	85,27	85,28	85,29	
			Rasio Kepatuhan IMB Kab / Kota	31,76	68,87	68,89	68,91	68,85	68,87	68,89	68,91	

note :

kolom 3 dan 4 : jika ada standar yang diatur oleh kementerian, silahkan tuliskan nilainya

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026
Kabupaten Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
sesuai Renstra 2024-2026						sesuai kebutuhan tahun rencana					
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	90,09	35.650.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	94,25	12.206.312.277	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah sambungan rumah air bersih non PDAM yang terbangun (SR)	90,09	35.650.000.000	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah sambungan rumah air bersih non PDAM yang terbangun (SR)	155 SR	12.206.312.277	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM		Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	1	400.000.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM		Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	1 dokumen	619.600.000	
	Supervisi Pembangunan / Peningkatan / Perluasan / Perbaikan SPAM		Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan / Peningkatan / Perluasan / Optimalisasi SPAM	1	250.000.000	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	25 liter/detik	2.106.412.277	
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya / SPAM Berbasis Masyarakat	4039	35.000.000.000	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	25 liter/detik	3.700.000.000	
						Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	155 SR	5.700.300.000	
						Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	30 lembaga	80.000.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dg baik di perkotaan	13,53	6.400.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dg baik di perkotaan	-	-	
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah sarana prasarana persampahan yang terbangun dg baik di perkotaan	13,53	6.400.000.000	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah sarana prasarana persampahan yang terbangun dg baik di perkotaan	-	-	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA / TPST / SPA / TPS-3R / TPS Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA / TPST / SPA / TPS-3R / TPS Kewenangan Kab/Kota yg Disusun	1	300.000.000	Pembangunan TPA / TPST / SPA / TPS-3R / TPS		Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	-	-	

	Supervisi Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan TPA / TPST / SPA / TPS-3R / TPS Kewenangan Kabupaten / Kota		Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan TPA / TPST / SPA Kewenangan Kab / Kota	1	100.000.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan		Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kab/Kota yg Disusun	-	-	
	Pembangunan TPA / TPST / SPA /TPS-3R / TPS		Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA / TPST / SPA / TPS-3R / TPS	1442	5.250.000.000	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS		Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi	-	-	
	Rehabilitasi TPA / TPST / SPA / TPS-3R / TPS		Jumlah TPA / TPST / SPA / TPS-3R / TPS yang Direhabilitasi	3	750.000.000	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS		Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan	-	-	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi / air limbah domestik (layak & aman)	81,85	3.250.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi / air limbah domestik (layak & aman)	85,28	3.672.999.353	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah sarana prasarana IPAL & IPLT yang terbangun (unit)	81,85	3.250.000.000	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah sarana prasarana IPAL & IPLT yang terbangun (unit)	2	3.672.999.353	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kab / Kota yang Disusun	1	250.000.000	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman		Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	0,15 mA3/hari	3.073.199.353	
	Supervisi Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota		Jumlah Dokumen Supervisi Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi / Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	1	500.000.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kab / Kota		Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kab / Kota yang Disusun	1 dokumen	599.800.000	
	Pembangunan / Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman		Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	48	2.500.000.000	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman		Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang ditingkatkan	-	-	
						Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)		Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya	-	-	
						Penyediaan Unit pengolahan setempat		Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.	-	-	
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		Persentase Pembangunan Gedung yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	70,73	87.175.000.000	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		Persentase Pembangunan Gedung yang Sesuai Dengan Peraturan Perundangan yang Berlaku	79,17	9.766.511.644	

	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan IMB dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		Persentase Bangunan Gedung yang Laik Fungsi	70,73	87.175.000.000	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan IMB dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		Jumlah kumulatif SLF yang diberikan	120	9.766.511.644	
	Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG		Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	120	600.000.000	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	3 BG	3.988.472.844	
	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kab/Kota	20	80.000.000.000	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	2 BG	500.000.000	
						Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung		Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	2 dok	70.000.000	
						Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	-	-	
	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara daerah Kabupaten / Kota		Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kab/Kota	4	75.000.000	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	3 dok	4.165.000.000	
	Rehabilitasi. Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kab / Kota		Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kab/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai	10	6.000.000.000	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG		Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	120 dok	1.043.038.800	

	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan	10	500.000.000						
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang mantap	100	3.250.000.000	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Mantap	100	1.750.000.000	
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kawasan strategis yg di-RTBL-kan	100	3.250.000.000	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		jumlah bangunan yang direvitalisasi setiap tahun	1	1.750.000.000	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten / Kota		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kab/Kota	2	500.000.000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	1 kawasan	1.750.000.000	
	Supervisi Penataan / Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan		Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	2	200.000.000	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1 dok	-	
	Penataan Bangunan dan Lingkungan		Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	2	1.200.000.000						
	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan		Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional & Kawasan Strategis Lainnya	2	1.250.000.000						
	Monitoring Penataan / Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Penataan / Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	2	100.000.000						
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		Persentase kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) utk perizinan berusaha yang diproses	96	3.480.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	65	3.483.621.925	
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW dan Rencana Rinci Tata Ruang RRTR Kabupaten/Kota		- Persentase rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kab Pasuruan yang ditetapkan	100	830.000.000	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW dan Rencana Rinci Tata Ruang RRTR Kabupaten/Kota		Persentase RTR (RTRW dan RDTR) yang ditetapkan	100,00	134.874.600	
			- Persentase rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) yang ditetapkan	100							

	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten / Kota		Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kab/Kota	1	200.000.000	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	2 dok	-	
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten / Kota		Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kab / Kota	2	400.000.000	Pelaksanaan Fasilitas RDTR Kabupaten/Kota		dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi	2 dok	-	
	Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota		dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi	0	-	Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota		dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi	1 dok	-	
	Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang		Jumlah Dokumen Kebijakan Perda / Perkada selain RTRW Kabupaten / Kota	1	200.000.000	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota		Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	2 dok	-	
	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang		Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	1	30.000.000	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang		Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	4 laporan	134.874.600	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Rencana Tata Ruang yang disusun	100	1.100.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Rencana Tata Ruang yang disusun	22,22	1.992.913.540	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten / Kota		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kab/Kota	1	400.000.000	Penyusunan Peta Dasar		Jumlah data SHP Peta Dasar	2 peta	813.844.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten / Kota		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kab/Kota	3	450.000.000	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota		Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	2 dok	-	
	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang		Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	1	250.000.000	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang		Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	5 org	60.000.000	
						Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota		Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota	1 dok	1.119.069.540	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pemanfaatan ruang utk investasi daerah & Pembangunan Daerah	50	850.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	5	594.370.435	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi & Pembangunan Daerah	50	650.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang		Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	2 dok	109.993.000	
	Sistem Informasi Penataan Ruang		Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	1	200.000.000	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang		Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	10 layanan	484.377.435	
						Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang		Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 SI	-	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pengendalian pemanfaatan ruang yang ditindaklanjuti	100	700.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase Pengendalian Pemanfaatan Ruang Yang dilaksanakan	33	761.463.350	

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	1	100.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang		Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	5 dok	52.561.350	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum bidang Penataan Ruang		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	4	100.000.000	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK		Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	20 dok	119.972.000	
	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Penataan Ruang		Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	40	250.000.000	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang		Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	3 laporan	588.930.000	
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang		Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	12	250.000.000						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	100	19.192.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	100%	12.420.673.955	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase konsistensi indikator kinerja program / kegiatan / subkegiatan pada dok rencana, anggaran, dan evaluasi	100	65.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan pada dok rencana, anggaran, dan evaluasi	100%	149.747.500	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	8	15.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 dok	12.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 dok	15.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	40.000.000	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 BA	92.500.000	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 laporan	30.247.500	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggung - jawabkan	100	15.900.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggung - jawabkan	100%	9.796.424.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	12.000.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 org/bln	9.556.184.000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	170	3.900.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	170 dok	240.240.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase laporan / dokumen BMD yg akurat dan sesuai dengan ketentuan	100	17.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase laporan / dokumen BMD yg akurat dan sesuai dengan ketentuan	100%	156.360.000	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5	17.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 dok	156.360.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	100	80.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	100%	100.697.400	

	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	271	40.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Terlaksananya sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	271 org	50.192.400	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50	40.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 org	50.505.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	100	532.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	100%	355.943.860	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	100.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	83.031.310	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100	117.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	59.723.550	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	100	15.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	33.189.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD	120	300.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD	12 Laporan	180.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pengadaan BMD yang terealisasi	100	700.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pengadaan BMD yang terealisasi	100%	693.796.054	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 unit	111.000.000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	300.000.000	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket	377.790.054	
	Pengadaan Alat Besar		Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	0	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 unit	205.006.000	
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	200.000.000						
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20	200.000.000						
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia	100	503.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia	100%	511.441.175	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	28	150.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	150.050.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	63.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	74.727.975	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	290.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	286.663.200	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD kondisi baik	100	1.395.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD kondisi baik	100%	656.263.966	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100	75.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	166.933.966	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100	270.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 unit	399.330.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar		Jumlah Alat Besar yang dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	11	750.000.000						
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	4	200.000.000						
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	100	100.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	12 unit	90.000.000	

Tabel 2.4
 Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
 Kabupaten Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Bangil	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		FS DED Islamic Center (Kec. Bangil)
2	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Raci	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Pembangunan interior command center kab. Pasuruan (Kec. Bangil)
3	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jalan Kakap RT.006 RW.002 Kelurahan Kalianyar Kecamatan Bangil Kab.Pasuruan., Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Pemb. Kel. Kalianyar Kec. Bangil
4	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	JL. RA. Kartini No. 04, Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Pemb. Kel. Latek Kec. Bangil
5	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kelurahan Kalirejo, Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Pembangunan Fasilitas Penunjang Kelurahan Kalirejo Kec. Bangil
6	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jl. Plaosan 666 Kersikan Bangil, Kab. Pasuruan	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan		Rehab Gedung Kantor Kelurahan Kersikan Kec. Bangil
7	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kelurahan Kalirejo, Kab. Pasuruan	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan		Rehab Gedung Kantor Kelurahan Kalirejo Kec. Bangil
8	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jalan DR.Sutomo RT 002 RW 003, Kab. Pasuruan	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan		Rehab Gedung Kantor Kelurahan Dermo Kec. Bangil

9	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jalan Tengiri 570 Kelurahan Bedomungal Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, Kab. Pasuruan	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan		Rehab Gedung Kantor Kelurahan Bedomungal Kec. Bangil
10	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jalan Budi Luhur Kelurahan Kolursari Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Kolursari Kec. Bangil
11	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Bangil	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan		Rehab Lapangan Tenis Kecamatan Bangil Kec. Bangil
12	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Bangil	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Pavingisasi Halaman Kantor Kecamatan Bangil
13	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Bangil	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Perluasan ruang tahanan polres Bangil
14	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kelurahan kolursari, Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Pengurugan Lahan Relokasi Kantor Kelurahan Kolursari Kecamatan Bangil
15	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kelurahan Kauman Kecamatan Bangil, Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Pengurugan Lahan Kel.Kauman Kec. Bangil
16	Pembangunan / Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Dusun kresikan RT. 001 RW. 006 Desa Bangil Kecamatan Bangil, Kab. Pasuruan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun		Pembangunan MCK Yayasan Al-Hikmah Bangil Kecamatan Bangil
17	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Lingkungan Krajan Tengah Kelurahan Pecalukan, Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Pembangunan Pagar Kantor Kelurahan Pecalukan Kecamatan Prigen

18	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SDN 1 PRIGEN Jl. RAYA PRIGEN NO. 142, Kab. Pasuruan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan		PPAB Kelurahan Prigen Kecamatan Prigen
19	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	DUSUN DAYU RT 012 RW 004 , Kab. Pasuruan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan		PPAB Desa Dayurejo Kecamatan Prigen
20	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Dusun Cowek Desa Jatiarjo, Kab. Pasuruan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		PPAB Desa Jatiarjo Kecamatan Prigen
21	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	DUSUN LUMBANGBORO RT. 003 RW. 012, Kab. Pasuruan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		PPAB Desa Lumbangrejo Kecamatan Prigen
22	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Lingkungan Krajan Tengah Kelurahan Pecalukan, Kab. Pasuruan	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan		Rehab Pendopo Kelurahan Pecalukan Kecamatan Prigen
23	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Perpipaan Dusun Bogem Desa Gambiran Kec Prigen, Kab. Pasuruan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan		PPAB Desa Gambiran Kecamatan Prigen
24	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	PPAB Perpipaan Dusun Lumbangboro Barat Desa Lumbangrejo Prigen, , Kab. Pasuruan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan		PPAB Desa Lumbangrejo Kecamatan Prigen
25	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Wonosunyo	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan		PPAB Ds. Wonosunyo Kec. Gempol
26	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Bulusari	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun		Sumur Bor ds. Bulusari Kec. Gempol
27	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Dusun Carat RT 001 RW 001, Kab. Pasuruan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan		PPAB Desa Carat Kecamatan Gempol
28	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Pembangunan Selter Banjir
29	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Dusun Jambe Rt.02/Rw.010 Desa Baujeng, Kab. Pasuruan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		PPAB Desa Baujeng Kecamatan Beji
30	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	KELURAHAN GLANGGANG Jl. Balai Agung RT.01 RW.01 Kelurahan Glanggang, Kab. Pasuruan	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan		Rehab Gedung Kantor Kelurahan Glanggang Kec. Beji

31	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	dusun mojorejo, Kab. Pasuruan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan		PPAB Desa Sidowayah Kecamatan Beji
32	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Dusun Gunungsari, Kab. Pasuruan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun		Sumur Bor Desa Gunungsari Kecamatan Beji
33	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Dusun Kenep Desa Kenep Kecamatan Beji, Kab. Pasuruan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan		PPAB Desa Kenep Kecamatan Beji
34	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Desa Kenep Kec Beji, Kab. Pasuruan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun		Sumur Bor Desa Kenep Kecamatan Beji
35	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Dusun Ampelsari RT 008 RW 003, Kab. Pasuruan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan		PPAB Desa Tambaksari Kecamatan Purwodadi
36	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Dsn Buntut, Kab. Pasuruan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun		Sumur Bor Desa Gajahrejo Kecamatan Purwodadi
37	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Dusun Pohtatal, Kab. Pasuruan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun		Sumur Bor Desa Dawuhansengon Kecamatan Purwodadi
38	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Dusun Popohan RT 01 RW 01 Desa Sentul Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan, Kab. Pasuruan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun		Sumur Bor Desa Sentul Kecamatan Purwodadi
39	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	DUSUN SEMUT KIDUL RT/RW 12/03 DESA SEMUT, Kab. Pasuruan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		PPAB Desa Semut Kecamatan Purwodadi
40	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Dusun Jatisari RT003 RW 004 Desa Purwodadi, Kab. Pasuruan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan		PPAB Desa Purwodadi Kecamatan Purwodadi
41	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Dusun Parelegi RT 003 RW 007 Desa purwodadi, Kab. Pasuruan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun		Sumur Bor Desa Purwodadi Kecamatan Purwodadi
42	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	pipanisasi dusun pohtatal dan dusun urung-urung di sumber kedung kotak desa gendro, Kab. Pasuruan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		PPAB Desa Dawuhansengon Kecamatan Purwodadi
43	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	dusun jambean, Kab. Pasuruan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun		Sumur Bor Desa Dawuhansengon Kecamatan Purwodadi

44	Pembangunan / Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Dusun Blimbing, dusun Ngaglik dan Dusun Paretinap, Kab. Pasuruan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun		Pembangunan MCK Ponpes Desa Purwodadi Kecamatan Purwodadi
45	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan		PPAB Desa Lebakrejo Kecamatan Purwodadi
46	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan		PPAB Desa Sentul Kecamatan Purwodadi
47	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun		Sumur Bor Desa Sentul Kecamatan Purwodadi
48	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Desa Purwodadi Kec. Purwodadi, Kab. Pasuruan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan		PPAB Desa Purwodadi Kecamatan Purwodadi
49	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Dusun Parelegi Desa Purwodadi Kec. Purwodadi, Kab. Pasuruan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun		Sumur Bor Desa Purwodadi Kecamatan Purwodadi
50	Pembangunan / Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Desa Purwodadi Kec. Purwodadi, Kab. Pasuruan			Pembangunan MCK TK Dharma Wanita Desa Purwodadi Kecamatan Purwodadi
51	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kraton	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan		Rehab Polsek Kraton
52	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Dusun Ketuwon RT 23 RW 04 Desa Sumberrejo Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan, Kab. Pasuruan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun		Sumur Bor Desa Sumberrejo Kecamatan Purwosari
53	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jalan Pandansari Km.1 RT.06 RW.07 Kelurahan Purwosari , Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Pembangunan Pagar Kantor Kelurahan Purwosari Kec. Purwosari
54	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jalan Pandansari Km.1 RT.06 RW.07 Kelurahan Purwosari, Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Pembangunan Rumah Dinas Kelurahan Purwosari Kec. Purwosari

55	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jalan Indrokilo RW.003 Kelurahan Purwosari, Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Pembangunan Gedung Serbaguna Kelurahan Purwosari Kec. Purwosari
56	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	RW.03 Dusun Kemantren, Kab. Pasuruan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun		Sumur Bor Desa Martopuro Kecamatan Purwosari
57	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Gutehan RT.06 RW. 01, Kab. Pasuruan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun		Sumur Bor Desa Karangrejo Kecamatan Purwosari
58	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan		PPAB Desa Sekarmojo Kecamatan Purwosari
59	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Purwosari	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan		Rehab Gedung Kantor Kecamatan Purwosari
60	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pohjentrek	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan		Rehab Pendopo Kecamatan Pohjentrek
61	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	RT 002 RW 001 DUSUN SUDAN, Kab. Pasuruan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun		Sumur Bor Desa Wonosari Kecamatan Wonorejo
62	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan		PPAB Dusun Madurejo Desa Wonorejo Kecamatan Wonorejo
63	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Dusun Curahwuluh RT 02 Rw 03 Desa Mojotengah, Kab. Pasuruan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		PPAB Desa Mojotengah Kecamatan Sukorejo
64	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Dusun Wetan Embong RW 09, Kab. Pasuruan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan		PPAB Desa Suwayuwo Kecamatan Sukorejo
65	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Dusun Wetan Embong RT 04 RW 09 Desa Suwayuwo, Kab. Pasuruan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun		Sumur Bor Desa Suwayuwo Kecamatan Sukorejo
66	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Dusun Tambakrejo Rt.004 Rw.002, Kab. Pasuruan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan		PPAB Desa Tanjungarum Kecamatan Sukorejo
67	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Dusun Ngemplak Rt.001 Rw.001, Kab. Pasuruan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun		Sumur Bor Desa Tanjungarum Kecamatan Sukorejo
68	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	dusun pakunden, Kab. Pasuruan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan		PPAB Desa Pakukerto Kecamatan Sukorejo

69	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Desa Gunting, Kab. Pasuruan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun		Sumur Bor Desa Gunting Kecamatan Sukorejo
70	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Dusun Sekarjalak RT 03 RW 07, Kab. Pasuruan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun		Sumur Bor Desa Mojotengah Kecamatan Sukorejo
71	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Desa Glagah sari Kec Sukorejo, Kab. Pasuruan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun		Sumur Bor Desa Glagahsari Kecamatan Sukorejo
72	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Desa Suwayuwo Kec Sukorejo Kab Pasuruan , Kab. Pasuruan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun		Sumur Bor Desa Suwayuwo Kecamatan Sukorejo
73	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Desa Candi Binangun Kec Sukorejo Kab Pasuruan , Kab. Pasuruan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun		Sumur Bor Desa Candibinangun Kecamatan Sukorejo
74	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Dusun Sekarjalak Desa Mojotengah Kec Sukorejo, Kab. Pasuruan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun		Sumur Bor Desa Mojotengah Kecamatan Sukorejo
75	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Dusun Pakunden Desa Pakukerto Kec. Sukorejo, Kab. Pasuruan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan		PPAB Dusun Pakunden Desa Pakukerto Kec. Sukorejo
76	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Rembang	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan		Rehab Gedung kantor kecamatan Rembang
77	Pembangunan / Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Desa Genengwaru Kecamatan Rembang, Kab. Pasuruan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun		Pembangunan MCK Masjid Al-Falah Desa Genengwaru Kecamatan Rembang
78	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		FS DED Islamic Center (Kec. Pandaan)
79	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jl. Balai Karya No. 1 Petungasri, Kab. Pasuruan	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan		Rehab Gedung Kantor Kelurahan Petungasri Kecamatan Pandaan
80	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Dusun Klampok RT. 002 RW. 011, Kab. Pasuruan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun		Sumur Bor Desa Sumbergedang Kecamatan Pandaan
81	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Dusun Rajeg RT. 002 RW. 015, Kab. Pasuruan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan		PPAB Desa Sumbergedang Kecamatan Pandaan

82	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Dusun tembong RT 002 RW 008, Kab. Pasuruan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		PPAB Desa Plintahan Kecamatan Pandaan
83	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pandaan	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Pavingisasi Halaman Kantor Kecamatan Pandaan
84	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Dusun Pandelegan Desa Sumberrejo Kecamatan Pandaan, Kab. Pasuruan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun		Sumur Bor Desa Sumberrejo Kecamatan Pandaan
85	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Dusun Rojogunting, Kab. Pasuruan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun		Sumur Bor Desa Kalirejo Kecamatan Gondangwetan
86	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	RT. 002 RW. 002 Lingkungan Krajan , Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Gondangwetan Kecamatan Gondangwetan
87	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kelurahan Gondangwetan Kecamatan Gondangwetan, Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Gondangwetan Kecamatan Gondangwetan
88	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	DUSUN PENGKOL RT 003 RW 002 DESA GONDANGREJO KECAMATAN GONDANG WETAN, Kab. Pasuruan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun		Sumur Bor Desa Gondangrejo Kecamatan Gondangwetan
89	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Dusun Patangpuluh RT 03 RW 01, Kab. Pasuruan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun		Sumur Bor Desa Sumberagung Kecamatan Grati
90	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Ambal Ambil	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun		Sumur Bor Ds. Ambal Ambil Kec. Kejayan
91	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Desa Linggo Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan, Kab. Pasuruan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun		Sumur Bor Desa Linggo Kecamatan Kejayan
92	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan		PPAB Desa Lorokan Kecamatan Kejayan

93	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun		Sumur Bor Desa Klangrong Kecamatan Kejayan
94	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan		PPAB Desa Kedungpengaron Kecamatan Kejayan
95	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan		PPAB Desa Wrati Kecamatan Kejayan
96	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kejayan	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Kejayan
97	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Dusun alang-alang dowo Desa klangrong Kejayan pasuruan, Kab. Pasuruan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan		PPAB Desa Klangrong Kecamatan Kejayan
98	Pembangunan / Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Dusun Karang Tengah Desa Kedung Pengaron Kec. Kejayan, Kab. Pasuruan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun		Pembangunan MCK Desa Kedungpengaron Kecamatan Kejayan
99	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	semudusari	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun		Sumur Bor Ds. Semedusari Kec. Lekok
100	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Wates	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun		Sumur Bor Ds. Wates Kec. Lekok
101	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Pasinan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun		Sumur Bor Ds. Pasinan Kec. Lekok
102	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Balunganyar	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun		Sumur Bor Ds. Balunganyar Kec. Lekok
103	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Lekok	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan		Rehab Gedung Kantor Kecamatan Lekok
104	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Pancur	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan		PPAB Ds. Pancur Kec. Lumbang
105	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Dari Madakaripura Menuju Dusun Banjarimbo desa Banjarimbo, Kab. Pasuruan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan		PPAB Desa Banjarimbo Kecamatan Lumbang

106	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Desa Bulukandang ke Desa Watulumbang, Kab. Pasuruan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		PPAB Desa Watulumbang Kecamatan Lumbang
107	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan		PPAB Desa Kronto Kecamatan Lumbang
108	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		PPAB Desa Karangjati Kecamatan Lumbang
109	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Sapulante	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi		PPAB Ds. Sapulante Kec. Pasrepan
110	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Pasrepan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun		Sumur Bor Ds. Pasrepan Kec. Pasrepan
111	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Dusun Precet Desa Klakah Rt 01 Rw 02, Kab. Pasuruan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun		Sumur Bor Desa Klakah Kecamatan Pasrepan
112	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi		PPAB Desa Mangguan Kecamatan Pasrepan
113	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi		PPAB Desa Sibon Kecamatan Pasrepan
114	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun		Sumur Bor Desa Ngantungan Kecamatan Pasrepan
115	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun		Sumur Bor Desa Petung Kecamatan Pasrepan
116	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pasrepan	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Pasrepan
117	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	desa kemiri, Kab. Pasuruan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		PPAB Ds. Kemiri Kec. Puspo
118	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Desa Puspo	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		PPAB Ds. Puspo Kec. Puspo
119	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Puspo	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Pemb. Kantor Kec. Puspo

120	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	dudun suruh rt 01 rw 01, Kab. Pasuruan	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi		Sumur Bor Desa Kedungbako Kecamatan Rejoso
121	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Rejoso	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan		Rehab Gedung Kantor Kecamatan Rejoso
122	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Rejoso	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan		Rehab Polsek Rejoso
123	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Rejoso	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan		Rehab Koramil Rejoso
124	Pembangunan / Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Dusun Suklan Desa Pandanrejo RT. 01 RW. 01, Kab. Pasuruan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun		Pembangunan MCK Pondok Pesantren Al-Qusyairi Desa Pandanrejo Kecamatan Rejoso
125	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	dusun sunogiri, Kab. Pasuruan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan		PPAB Desa Podokoyo Kecamatan Tosari
126	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Dusun Gemboyo RT 05 RW 02, Kab. Pasuruan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		PPAB Desa Morejo Kecamatan Tosari
127	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Dusun Junggo, Kab. Pasuruan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		PPAB Desa Baledono Kecamatan Tosari
128	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan		PPAB Desa Wonokitri Kecamatan Tosari
129	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Dsn Sunogiri ds Podokoyo kec Tosari, Kab. Pasuruan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		PPAB Desa Podokoyo Kecamatan Tosari
130	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Dusun Krajan, Dusun Manggungan, Dusun Banyusari, Dusun Pronojiwo, Dusun Cemoro Desa Blarang Kecamatan Tuter, Kab. Pasuruan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		PPAB Desa Blarang Kecamatan Tuter
131	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Dusun Garutan/Kelek RT 02 RW 11, Kab. Pasuruan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		PPAB Desa Ngembal Kecamatan Tuter

132	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.Dusun Sumberpitu 2.Dusun Tuyowono 3.Dusun Dempok 4.Dusun Curah Buntung 5.Dusun Campal, Kab. Pasuruan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		PPAB Desa Sumberpitu Kecamatan Tukur
133	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kumbo	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan		PPAB & Tandon Air Dusun Kumbo Desa Tlogosari Kecamatan Tukur
134	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		PPAB Ds. Jeladri Kec. Winongan
135	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		PPAB Ds. Kedungrejo Kec. Winongan
136	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		PPAB Ds. Sumberrejo Kec. Winongan
137	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Pembangunan Selter Banjir
138	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Winongan	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan		Rehab Koramil winongan
139	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Desa Sruwi Kec Winongan, Kab. Pasuruan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun		Sumur Bor Desa Sruwi Kecamatan Winongan

	Tabel 3.2.A				
	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah				
	Tujuan/ Sasaran/ SPM/ IKK	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Proyeksi 2025	Target 2026
	Tujuan :	Indikator Tujuan :			
	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Keciptakaryaan dan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Indeks Infrastruktur Keciptakaryaan	90,90	91,10	91,18
		Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	33,01	33,21	33,41
	Sasaran :	Indikator Sasaran :			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur Keciptakaryaan	Persentase pengelolaan dan pengembangan SPAM dan air limbah domestik	89,70	89,76	89,77
		Persentase Penataan Bangunan Gedung	92,10	92,45	92,60
	Terwujudnya Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang	Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang	84,03	84,23	84,43
	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	80,80	80,90	81,00
		SPM :			
		Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari			
		JUMLAH YANG HARUS DILAYANI	11784	1016	620
		Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	2946	254	155
		Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst. (sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023)	2946	254	155
		Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik			
		JUMLAH YANG HARUS DILAYANI	10252	96	72
		Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	2563	24	18
		Ukuran kualitas penyediaan pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar individual dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa yang tersambung ke SPALD-T Kabupaten/Kota	2563	0	0
		Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan > 25 jiwa/hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septic sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala minimal 3 tahun sekali dan diolah di IPLT Kabupaten/Kota	0	0	0

		Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan < 25 jiwa/hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	2563	24	18
		IKK :			
		Persentase jumlah rumah tangga yg mendapatkan akses thd air minum melalui SPAM jaringan perpipaan & bukan jaringan perpipaan terlindungi thd rumah tangga di seluruh kab / kota	73,83	94,24	94,25
		Persentase jumlah rumah tangga yg memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	69,48	85,27	85,28
		Rasio Kepatuhan IMB Kab / Kota	68,85	68,87	68,89

Tabel 3.2.B
Sinkronisasi Indikator Sasaran RPD dan IKU

lihat RPD bab 5

lihat RENSTRA PD (2024-2026)

Indikator Sasaran RPD			IKU			Program
Indikator	Formulasi	Target 2026	Indikator	Formulasi	Target 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Indeks Infrastruktur Wilayah	rata-rata (Indeks Aksesibilitas + Indeks Infrastruktur SDA Cipta Karya + Indeks Infrastruktur Perhubungan + Indeks Kinerja Pengolahan Sampah)	49,3	Indeks Infrastruktur Keciptakaryaan	(Rerata dari Persentase pengelolaan dan pengembangan SPAM dan air limbah domestik + Persentase Penataan Bangunan Gedung)	91,18	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
						Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
						Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
						Program Penataan Bangunan Gedung
						Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
Nilai Investasi Daerah	Nilai Investasi yang tercatat dalam LKPM Online	9.500	Indeks Penyelenggaraa n Penataan Ruang	Dihitung dari Perencanaan + Pemanfaatan + Pengendalian pemanfaatan ruang	33,41	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
			Persentase pengelolaan dan pengembangan SPAM dan air limbah domestik	Rerata Capaian air minum + air limbah	89,77	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
						Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

			Persentase Penataan Bangunan	rerata dari capaian penataan bangunan gedung + penataan bangunan dan lingkungannya	92,60	Program Penataan Bangunan Gedung
						Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
			Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang	Luasan pemanfaatan lahan yang sesuai dibanding luasan lahan yang dimohon x 100 %	84,43	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
			Nilai SAKIP PD	Hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat	81,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab / Kota

PEMETAAN NOMENKLATUR PROG/KEG/SUBKEG PADA DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TERHADAP SIPD

Perangkat Daerah : Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang
Urusan : Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

DOKUMEN RENSTRA PD 2024-2026						SIPD tahun 2026 (Kepmendagri 900.1-2850 Tahun 2025)				
KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator	- Pemutakhiran; atau - Penonaktifan;	KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Subkegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Tercapainya kesesuaian penataan ruang	Persentase kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) utk perizinan berusaha yang diproses	%		1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG (P2)	Tercapainya kesesuaian penataan ruang	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	%
									Luas Pemanfaatan Ruang Yang Sesuai RTR : Luas Permohonan Pemanfaatan Ruang x 100 % (data KKPR dan SKRK)	
1.03.012.201	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten / Kota	Meningkatnya RTRW dan RRTR sesuai ketentuan yg ditetapkan	- Persentase rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kab Pasuruan yang ditetapkan	%		1.03.12.2,01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten / Kota	Meningkatnya Jumlah Rencana Tata Ruang (RTR) yang ditetapkan sesuai ketentuan	Persentase RTR (RTRW dan RDTR) yang ditetapkan	%
			- Persentase rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) yang ditetapkan	%					RTR (RTRW dan RDTR) yang ditetapkan : RTR (RTRW dan RDTR) yang direncanakan x 100 %	
1.03.012.201.01	1.1 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten / Kota	Terlaksananya Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kab/Kota	Dok	Pemutakhiran	1.03.12.2,01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen
1.03.012.201.02	1.2 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten / Kota	Terlaksananya Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kab / Kota	Dok	Penonaktifan	1.03.12.2,01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten / Kota	Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen

						1.03.12.2,01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten / Kota	Terpenuhiya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen
						1.03.12.2,01.0007	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	Tersampaiannya informasi penataan ruang kepada masyarakat	Jumlah publikasi informasi penataan ruang	Publikasi
1.03.012.201.03	1.3 Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda / Perkada selain RTRW Kabupaten / Kota	Dok	Pemutakhiran	1.03.12.2,01.0008	Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota	Terpenuhiya dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi	dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi	Dokumen
1.03.012.201.04	1.4 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	Dok	Pemutakhiran	1.03.12.2,01.0009	Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota	Terpenuhiya dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi	dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi	Dokumen
						1.03.12.2,01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Tersedianya Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen
						1.03.12.2,01.0011	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Tersedianya Perda RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen
						1.03.12.2,01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang	Laporan
1.03.012.202	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten / Kota	Meningkatnya RTRW dan RRTR sesuai ketentuan yang disusun	Persentase Rencana Tata Ruang yang disusun	%		1.03.12.2,02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten / Kota	Meningkatnya kualitas RTR yang disusun	Persentase Rencana Tata Ruang yang disusun	%
									Rencana Tata Ruang yang disusun : Keseluruhan Rencana Tata Ruang yang harus disusun (belum penetapan menjadi Perda/perbub)	

1.03.012.202.01	2.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten / Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kab/Kota	Dok	Penonaktifan	1.03.12.2,02.0004	Penyusunan Peta Dasar	Tersedianya orthorektifikasi citra dari raw citra ke format ECW dan tersedianya data SHP Peta Dasar	Jumlah data SHP Peta Dasar	Peta
						1.03.12.2,02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Tersedianya materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen
						1.03.12.2,02.0006	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang	Terlaksananya kegiatan peningkatan kualitas SDM perencanaan tata ruang	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Orang
1.03.012.202.02	2.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten / Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kab/Kota	Dok	Pemutakhiran	1.03.12.2,02.0007	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Tersedianya materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen
1.03.012.202.03	2.3 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Terlaksananya Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	Dok	Pemutakhiran	1.03.12.2,02.0008	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Terlaksananya Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	Kegiatan
1.03.012.203	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten / Kota	Meningkatnya pemanfaatan ruang utk investasi daerah & pembangunan daerah yang sesuai ketentuan	Persentase pemanfaatan ruang utk investasi daerah & Pembangunan Daerah	%		1.03.12.2,03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten / Kota	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi Pemanfaatan Ruang	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Dokumen
									Jumlah dokumen hasil koordinasi	
1.03.012.203.01	3.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi & Pembangunan Daerah	Dok	Penonaktifan	1.03.12.2,03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Terlaksananya kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang untuk meningkatkan kerja sama antarpemangku kepentingan	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Dokumen
						1.03.12.2,03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Terlayannya permohonan dokumen Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku yaitu 20 hari	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	Layanan

1.03.012.203.02	3.2 Sistem Informasi Penataan Ruang	Tersedianya Data dan Informasi yang Dihasilkan Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	Dok	Pemutakhiran	1.03.12.2,03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Tersedianya dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	Dokumen
						1.03.12.2,03.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Tersedia dan terlaksananya pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Sistem Informasi
1.03.012.204	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten / Kota	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang daerah sesuai ketentuan	Persentase pengendalian pemanfaatan ruang yang ditindaklanjuti	%		1.03.12.2,04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kab/Kota	Meningkatnya Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Prosentase Pengendalian Pemanfaatan Ruang Yang dilaksanakan	%
									Jumlah Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang dilaksanakan : Jumlah Pengendalian yang Direncanakan x 100 %	
1.03.012.204.01	4.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Dok	Pemutakhiran	1.03.12.2,04.0003	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya Kegiatan yang Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Kasus
1.03.012.204.02	4.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum bidang Penataan Ruang	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Dok	Penonaktifan	1.03.12.2,04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen
1.03.012.204.03	4.3 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Penataan Ruang	Terlaksananya Kegiatan yang Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Kasus	Pemutakhiran	1.03.12.2,04.0005	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	Laporan
1.03.012.204.04	4.4 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dok	Pemutakhiran	1.03.12.2,04.0006	Pelaksanaan Audit Tata Ruang	Terlaksananya Audit Tata Ruang	Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang	Kasus
						1.03.12.2,04.0007	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	Terlaksananya tahapan kegiatan Pengenaan Sanksi Administratif	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	Kasus

						1.03.12.2,04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen
						1.03.12.2,04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Terlaksananya Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Laporan
						1.03.12.2,04.0010	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis Kawasan	Terlaksananya pemenuhan standar teknis kawasan	Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	Dokumen
						1.03.12.2,04.0011	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Terlaksananya Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	Dokumen
						1.03.12.2,04.0012	Penilaian Perwujudan RTR	Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	Dokumen
						1.03.12.2,04.0013	Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang	Terselesaikan sengketa penataan ruang	Jumlah Berita Acara penyelesaian sengketa penataan ruang	Berita Acara
						1.03.12.2,04.0014	Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	Dokumen
						1.03.12.2,04.0015	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Terlaksananya Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Berita Acara
						1.03.12.3,05	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Koordinasi Forum Penataan Ruang yang dilaksanakan	%
									Terlaksananya Koordinasi penataan ruang : koordinasi penataan ruang yang direncanakan	
						1.03.12.3,05.0001	Fasilitasi forum penataan ruang di lingkungan Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya forum penataan ruang di lingkungan Kabupaten/Kota	Rekomendasi atas Fasilitasi forum penataan ruang di lingkungan Kabupaten/Kota	Dokumen

1.03.03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Tersedianya akses air minum yg layak pd RT	Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	%		1.03.03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Tersedianya akses air minum yg layak pd RT	Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	%
									Jumlah rumah tangga yang terlayani dibanding Jumlah rumah tangga keseluruhan x 100%	
1.03.03.201	Pengelolaan & Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota	Tersedianya sarana prasarana air minum yang layak pada Rumah Tangga	Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	%		1.03.03.2,01	Pengelolaan & Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota	Tersedianya sarana prasarana air minum yang layak pada Rumah Tangga	Jumlah sambungan rumah air bersih non PDAM yang terbangun (SR)	SR
									Dihitung Jumlah sambungan rumah air bersih non PDAM yang terbangun setiap tahun	
1.03.03.201.01	1.1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	Dok	Pemutakhiran	1.03.03.2,01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	Dokumen
1.03.03.201.02	1.2 Supervisi Pembangunan / Peningkatan / Perluasan / Perbaikan SPAM	Terlaksananya Supervisi Pembangunan / Peningkatan / Perluasan / Optimalisasi SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan / Peningkatan / Perluasan / Optimalisasi SPAM	Dok	Penonaktifan	1.03.03.2,01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan AirMinum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Liter/Detik
1.03.03.201.04	1.3 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Terbangunnya SPAM Berbasis Masyarakat	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya / SPAM Berbasis Masyarakat	SR	Pemutakhiran	1.03.03.2,01.0023	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	Lembaga
						1.03.03.2,01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Liter/Detik
						1.03.03.2,01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR
1.03.04	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Tersedianya akses sampah yg baik pd RT	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dg baik di perkotaan	%		1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL (P2)	Tersedianya akses sampah yang baik pada Rumah Tangga	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dg baik di perkotaan	%
									Jumlah rumah tangga yang terlayani akses sampah dibanding Jumlah rumah tangga keseluruhan x 100%	

1.03.04.201	Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Di Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana prasarana persampahan yang layak pada Rumah Tangga yang terbangun	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dg baik di perkotaan	%		1.03.04.2,01	Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Di Daerah Kab/Kota	Tersedianya sarana prasarana persampahan yang layak pada Rumah Tangga yang terbangun	Jumlah sarana prasarana persampahan yang terbangun dg baik di perkotaan	unit
									Dihitung Jumlah sarpras persampahan yang terbangun setiap tahun	
1.03.04.201.01	1.1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA / TPST / SPA / TPS-3R / TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA / TPST / SPA / TPS-3R / TPS Kewenangan Kab / Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA / TPST / SPA / TPS-3R / TPS Kewenangan Kab/Kota yg Disusun	Dok	Pemutakhiran	1.03.04.2,01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA / TPST / SPA / TPS-3R / TPS Kewenangan Kab / Kota	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TP S-3R/TPS Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kab/Kota yg Disusun	Dokumen
1.03.04.201.02	1.2 Supervisi Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan TPA / TPST / SPA / TPS-3R / TPS Kewenangan Kabupaten / Kota	Terlaksananya Supervisi Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan TPA / TPST / SPA Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan TPA / TPST / SPA Kewenangan Kab / Kota	Dok	Penonaktifan	1.03.04.2,01.0010	Pembangunan TPA / TPST / SPA / TPS-3R / TPS	Terlayannya Rumah Tangga Melalui Pembangunan TPA/TPST/SPA/TP S-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Rumah Tangga
1.03.04.201.03	1.3 Pembangunan TPA / TPST / SPA / TPS-3R / TPS	Terlayannya Rumah Tangga Melalui Pembangunan TPA / TPST / SPA / TPS-3R / TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA / TPST / SPA / TPS-3R / TPS	RT	Pemutakhiran	1.03.04.2,01.0016	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Teroptimalisasinya TPA/TPST/SPA/TP S-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi	Unit
1.03.04.201.04	1.4 Rehabilitasi TPA / TPST / SPA / TPS-3R / TPS	Terlaksananya Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA / TPST / SPA / TPS-3R / TPS yang Direhabilitasi	Unit	Penonaktifan	1.03.04.2,01.0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Tersedianya Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TP S-3R/TPS	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan	Unit
1.03.05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Tersedianya akses sanitasi / air limbah yg layak & aman pada RT	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi / air limbah domestik (layak & aman)	%		1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH (P1)	Tersedianya akses sanitasi / air limbah yang layak dan aman pada Rumah Tangga	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi / air limbah domestik (layak & aman)	%
									Jumlah rumah tangga yg memiliki SR & air limbahnya diolah di IPAL dibanding Jumlah rumah tangga keseluruhan x 100%	
1.03.05.201	Pengelolaan & Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten / Kota	Tersedianya sarana prasarana akses sanitasi / air limbah yang terbangun	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi / air limbah domestik (layak & aman)	%		1.03.05.2,01	Pengelolaan & Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kab / Kota	Tersedianya sarana prasarana akses sanitasi / air limbah yang terbangun	Jumlah sarana prasarana IPAL & IPLT yang terbangun	unit
									Dihitung Jumlah sarpras IPAL & IPLT yang dibangun setiap tahun	

1.03.05.201.01	1.1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kab / Kota yang Disusun	Dok	Pemutakhiran	1.03.05.2,01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kab / Kota	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kab / Kota yang Disusun	Dokumen
1.03.05.201.02	1.2 Supervisi Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Terlaksananya Konsultasi Supervisi Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah Dokumen Supervisi Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi / Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Dok	Penonaktifan	1.03.05.2,01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	M ³ /Hari
1.03.05.201.05	1.3 Pembangunan / Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Terlayannya Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	RT	Pemutakhiran	1.03.05.2,01.0032	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Meningkatnya Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang ditingkatkan	M ³ /Hari
						1.03.05.2,01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Tersedianya Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Rumah Tangga
						1.03.05.2,01.0035	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang mendapatkan Pengembangan Kapasitas	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya	Penyelenggara
						1.03.05.2,01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Terbangunnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	M ³ /Hari
						1.03.05.2,01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Tersedianya Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Rumah Tangga
						1.03.05.2,01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Tersedianya Sub Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	Rumah Tangga
						1.03.05.2,01.0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Tersedianya Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	Unit
1.03.07	Program Pengembangan Permukiman	Tersedianya permukiman dengan infrastruktur yang baik	Persentase permukiman yang dilengkapi infrastruktur yang baik	Kawasan						

1.03.07.201	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten / Kota	Tersedianya permukiman dengan infrastuktur yang baik	Persentase permukiman yang dilengkapi infrastruktur yang baik	Kawasan						
1.03.07.201.01	1.1 Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kab / Kota	Terlaksananya Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kab / Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kab/Kota	Sistem Jaringan	Penonaktifan					
1.03.07.201.02	1.2 Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kab / Kota	Terlaksananya Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kab / Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dipelihara di Kawasan Strategis Daerah Kab/Kota	Sistem Jaringan	Penonaktifan					
1.03.07.201.03	1.3 Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kab / Kota	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kab / Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Diawasi dan Dikendalikan di Kawasan Strategis Daerah Kab/Kota	Sistem Jaringan	Penonaktifan					
1.03.07.201.04	1.4 Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kab / Kota	Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kab / Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kab/Kota	Orang	Penonaktifan					
1.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung	Tersedianya bangunan gedung sesuai peraturan perundangan yang berlaku	Persentase Pembangunan Gedung yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	%		1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG (P2)	Tersedianya bangunan gedung sesuai peraturan perundangan yang berlaku	Persentase Pembangunan Gedung yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	%
									Jumlah bangunan yang berfungsi : Jumlah bangunan yang terbangun dalam setahun x 100%	
1.03.08.201	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Tersedianya bangunan gedung laik fungsi	Persentase Bangunan Gedung yang Laik Fungsi	%		1.03.08.2,01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Tersedianya bangunan gedung laik fungsi	Banyaknya SLF & PBG yang diterbitkan setiap tahun	SLF
									Jumlah SLF yang diberikan setiap tahun	

1.03.08.201.01	1.1 Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Terselenggaranya Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Dok	Pemutakhiran	1.03.08.2,01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengubahsuaian	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	Bangunan Gedung
1.03.08.201.02	1.2 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten / Kota	Tersusunnya Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kab / Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kab/Kota	Dok	Pemutakhiran	1.03.08.2,01.0018	Pemeliharaan, Perawatan dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	Bangunan Gedung
1.03.08.201.05	1.3 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara daerah Kabupaten / Kota	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kab/Kota	Dok	Penonaktifan	1.03.08.2,01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Tersusunnya Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Dokumen
1.03.08.201.12	1.4 Rehabilitasi. Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kab / Kota	Terlaksananya Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kab/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui	Unit	Pemutakhiran	1.03.08.2,01.0020	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Bantuan Teknis
1.03.08.201.13	1.5 Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten / Kota	Terpeliharanya dan Terawatnya Bangunan Gedung Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan	Unit	Pemutakhiran	1.03.08.2,01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen

						1.03.08.2,01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Dokumen
1.03.09	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Tercapainya penataan bangunan dan lingkungan yang mantap	Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang mantap	%		1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA (P2)	Tercapainya penataan bangunan dan lingkungan yang mantap	Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang mantap	%
									Jumlah bangunan yang dipelihara : Jumlah bangunan yang direncanakan setiap tahun x 100%	
1.03.09.201	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis	Jumlah kawasan strategis yg di-RTBL-kan			1.03.09.2,01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kab / Kota	Meningkatnya kualitas penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis	Jumlah kawasan strategis yg di-RTBL-kan	
									Dihitung jumlah bangunan yang direvitalisasi setiap tahun	
1.03.09.201.01	1.1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten / Kota	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kab/Kota	Dok	Pemutakhiran	1.03.09.2,01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Tertatanya Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	Kawasan

1.03.09.201.02	1.2 Supervisi Penataan / Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Kawasan	Pemutakhiran	1.03.09.2,01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
1.03.09.201.03	1.3 Penataan Bangunan dan Lingkungan	Tertatanya Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Kawasan	Pemutakhiran					
1.03.09.201.04	1.4 Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Terpeliharanya Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional & Kawasan Strategis Lainnya	Kawasan	Penonaktifan					
1.03.09.201.06	1.5 Monitoring Penataan / Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Terlaksananya Monitoring Penataan / Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Penataan / Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	dok	Penonaktifan					
X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab / Kota	Terlaksananya pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	%		1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA (P3)	Terlaksananya administrasi tata kelola PD dengan baik	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	%
X.XX.01.201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dok perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang selaras	Persentase konsistensi indikator kinerja program / kegiatan / subkegiatan pada dok rencana, anggaran, dan evaluasi	%		1.03.01.2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dok perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang selaras	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan pada dok rencana, anggaran, dan evaluasi	%

X.XX.01.201.01	1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	Pemutakhiran	1.03.01.2,01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen
X.XX.01.201.02	1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Pemutakhiran	1.03.01.2,01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen
						1.03.01.2,01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara
X.XX.01.201.06	1.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Pemutakhiran	1.03.01.2,01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan
X.XX.01.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya laporan keuangan yang akurat	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggung - jawabkan	%		1.03.01.2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya laporan keuangan yang akurat	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggung - jawabkan	%
X.XX.01.202.01	2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	org/bln	Pemutakhiran	1.03.01.2,02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	org/bln
X.XX.01.202.02	2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	Pemutakhiran	1.03.01.2,02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen
X.XX.01.203	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya pengelolaan BMD dengan baik	Persentase laporan / dokumen BMD yg akurat dan sesuai dengan ketentuan	%		1.03.01.2,03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya pengelolaan BMD dengan baik	Persentase laporan / dokumen BMD yg akurat dan sesuai dengan ketentuan	%
X.XX.01.203.02	3.1 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	unit	Pemutakhiran	1.03.01.2,03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen
X.XX.01.205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian dengan baik	Persentase dokumen administrasi kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	%		1.03.01.2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian dengan baik	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	%

X.XX.01.205.011	4.1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	Pemutakhiran	1.03.01.2,05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang
X.XX.01.205.010	4.2 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	Pemutakhiran	1.03.01.2,05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang
X.XX.01.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan umum perangkat daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	%		1.03.01.2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan umum perangkat daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	%
X.XX.01.206.04	5.1 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Pemutakhiran	1.03.01.2,06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket
X.XX.01.206.05	5.2 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Pemutakhiran	1.03.01.2,06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket
X.XX.01.206.08	5.3 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Pemutakhiran	1.03.01.2,06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan
X.XX.01.206.09	5.4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD	Laporan	Pemutakhiran	1.03.01.2,06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD	Laporan
X.XX.01.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan BMD	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi	%		1.03.01.2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan BMD	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi	%
X.XX.01.207.01	6.1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	Pemutakhiran					
X.XX.01.207.02	6.2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	Pemutakhiran	1.03.01.2,07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit
X.XX.01.207.03	6.3 Pengadaan Alat Besar	Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	unit	Pemutakhiran					
X.XX.01.207.05	6.4 Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	Pemutakhiran	1.03.01.2,07.0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit
X.XX.01.207.010	6.5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	Pemutakhiran	1.03.01.2,07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit
X.XX.01.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhiya penunjang operasional kantor	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia	%		1.03.01.2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhiya penunjang operasional kantor	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia	%
X.XX.01.208.02	7.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Pemutakhiran	1.03.01.2,08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan

X.XX.01.208.03	7.2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	Pemutakhiran	1.03.01.2,08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan
X.XX.01.208.04	7.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Pemutakhiran	1.03.01.2,08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan
X.XX.01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya BMD yang dapat beroperasi dengan baik	Persentase BMD kondisi baik	%		1.03.01.2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya BMD yang dapat beroperasi dengan baik	Persentase BMD kondisi baik	%
X.XX.01.209.01	8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Pemutakhiran	1.03.01.2,09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit
X.XX.01.209.02	8.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Pemutakhiran	1.03.01.2,09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit
X.XX.01.209.03	8.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit	Pemutakhiran	1.03.01.2,09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit
X.XX.01.209.09	8.4 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	Pemutakhiran					
X.XX.01.209.011	8.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	Pemutakhiran	1.03.01.2,09.0011	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit

Tabel 3.3

lihat tabel 3.4 kolom 2

IKU RPJMD	Tema 2026	Prioritas Pembangunan		IKU PD	Subkegiatan	Kegiatan	Program	33 Program Prioritas
		Prioritas Pembangunan	Sub Prioritas					
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)
		PPD 1 : Peningkatan kualitas SDM Tenaga Kerja yang berdaya saing						
		PPD 2 : Peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas bahan baku	Pengendalian alih fungsi lahan pertanian dan perikanan	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	
Persentase jumlah rumah tangga yg mendapatkan akses thd air minum melalui SPAM jaringan perpipaan & bukan jaringan perpipaan terlindungi thd rumah tangga di seluruh kab / kota	Hilirisasi Industri dan Pengolahan Potensi Unggulan Daerah untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan	PPD 3 : Pengembangan industri Pengolahan unggulan Daerah dan Hasil Produksi yang kompetitif	Peningkatan akses jaringan air minum dan energi	Indeks Infrastruktur Keciptakaryaan	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Pengelolaan & Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
					Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan			
					Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan			
		PPD 4 : Peningkatan tata kelola pemerintahan yang responsif, kolaboratif dan berbasis digital						

Tabel 3.4
Matrik Perencanaan Pembangunan Tahunan pada RKPD Tahun 2026

[illegible]

	Perlinsos bagi kelompok masyarakat rentan (lansia, anak-anak, fakir miskin, Wanita hamil, dan penyandang cacat/disabilitas) serta peningkatan pendapatan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah												
	Merdeka pupuk, petani milenial, eco farming dan pengembangan teknologi pertanian untuk petani												
	Penataan kawasan kumuh/kawasan nelayan dan Pembangunan infrastruktur pendukung (tambatan perahu, tangkis laut, dan lainnya) untuk petani tambak dan nelayan												
	IPAL komunal, bio gas dan mandiri pakan untuk peternak												
	Peningkatan infrastruktur jalan menuju pusat produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta dukung infrastruktur menuju daerah wisata												
	Pembangunan / pengadaan sarana pendukung dalam mengatasi banjir yang terintegrasi dari hulu sampai hilir												
	Pencarian sumber mata air baru dan pipanisasi air bersih untuk mengatasi kebutuhan air bersih di daerah kekurangan air		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	25 liter/detik	2.106.412.277					
					Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	25 liter/detik	3.700.000.000					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	Tabel 3.5				
	Program Pendukung Inovasi Perangkat Daerah				
	Tahun 2026				
	Inovasi	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran
	SITARU	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten / Kota	Sistem Informasi Penataan Ruang	-

Tabel 3.6 Program Pendukung IK RPJPD

INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN

IK RPJPD	Formula/ Definisi Operasional	Variabel Pembentuk (Metadata)	Target	Ada/ Tidak	Subkegiatan	Kegiatan	Program
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	Akses Aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T)	Jumlah Rmh Tangga dg akses SPALDT	28073	Ada	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
		Jumlah rmh tangga dg tangki septik disedot minimal sekali dalam 5 th terkahir dan diolah IPLT	504		Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
		Jumlah Rumah Tangga	420.255				
Rasio ketersediaan air minum dan kebutuhan air minum	Rasio Ketersediaan Air Minum dan Kebutuhan Air Minum merupakan perbandingan ketersediaan air dan kebutuhan air untuk minum yang dinyatakan dalam persentase	Volume ketersediaan air minum (m3)	24.430.367	Ada	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM di Daerah Kabupaten/Kota	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
		Volume kebutuhan air minum (m3)	3.793.360		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM di Daerah Kabupaten/Kota	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
					Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM di Daerah Kabupaten/Kota	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan adalah rumah tangga di perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut 1) Rumah tangga menggunakan sumber air minum jaringan perpipaan; 2) Lokasi sumber air minum berada di dalam atau di halaman rumah (on premises); 3) Tersedia setiap saat dibutuhkan; dan 4) Memenuhi syarat kualitas air minum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023.	<i>Jumlah Rumah tangga dg akses air siap minum perpipaan</i>	96.868	Ada	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM di Daerah Kabupaten/Kota	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
		Jumlah Rumah Tangga	420.255		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM di Daerah Kabupaten/Kota	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
					Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM di Daerah Kabupaten/Kota	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Tabel 4
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kabupaten Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Tersedianya akses air minum yg layak pd RT	Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak		73,94	12.206.312.277			73,94	12.206.312.277
1.03.03.2,01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM di Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana prasarana air minum yang layak pada Rumah Tangga	Jumlah sambungan rumah air bersih non PDAM yang terbangun (SR)		155 SR	12.206.312.277			155 SR	12.206.312.277
1.03.03.2,01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	Kab.Pas	1 dokumen	Rp 619.600.000			1 dokumen	619.600.000
						Belanja operasi : Rp 619.600.000				
						Belanja pegawai : Rp -				
						Belanja barang dan jasa : Rp 619.600.000				
						Belanja bunga : Rp -				
						Belanja subsidi : Rp -				
						Belanja hibah : Rp -				
						Belanja bantuan : Rp -				
						Belanja modal : Rp -				
						Belanja tidak terduga : Rp -				
1.03.03.2,01.0023	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Kab.Pas	25 liter/detik	Rp 2.106.412.277			25 liter/detik	2.106.412.277
						Belanja operasi : Rp 2.106.412.277				
						Belanja pegawai : Rp -				
						Belanja barang dan jasa : Rp -				
						Belanja bunga : Rp -				
						Belanja subsidi : Rp -				
						Belanja hibah : Rp 2.106.412.277				
						Belanja bantuan : Rp -				
						Belanja modal : Rp -				
						Belanja tidak terduga : Rp -				
1.03.03.2,01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun		25 liter/detik	Rp 3.700.000.000			25 liter/detik	3.700.000.000
						Belanja operasi : Rp 3.700.000.000				
						Belanja pegawai : Rp -				
						Belanja barang dan jasa : Rp -				
						Belanja bunga : Rp -				
						Belanja subsidi : Rp -				
						Belanja hibah : Rp 3.700.000.000				
						Belanja bantuan : Rp -				
						Belanja modal : Rp -				
						Belanja transfer : Rp -				

1.03.03.2,01.0 032						Belanja tidak terduga : Rp	-				
						Belanja transfer : Rp	-				
	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	(diisi)	155 SR	Rp	5.700.300.000			155 SR	5.700.300.000
						Belanja operasi : Rp	5.700.300.000				
						Belanja pegawai : Rp	-				
						Belanja barang dan jasa : Rp	-				
						Belanja bunga : Rp	-				
						Belanja subsidi : Rp	-				
						Belanja hibah : Rp	5.700.300.000				
						Belanja bantuan : Rp	-				
1.03.03.2,01.0 023						Belanja modal : Rp	-				
						Belanja tidak terduga : Rp	-				
						Belanja transfer : Rp	-				
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	(diisi)	30 lembaga	Rp	80.000.000			30 lembaga	80.000.000
						Belanja operasi : Rp	80.000.000				
						Belanja pegawai : Rp	-				
						Belanja barang dan jasa : Rp	-				
						Belanja bunga : Rp	-				
						Belanja subsidi : Rp	-				
						Belanja hibah : Rp	80.000.000				
1.03.04						Belanja bantuan : Rp	-				
						Belanja modal : Rp	-				
						Belanja tidak terduga : Rp	-				
						Belanja transfer : Rp	-				
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Tersedianya akses sampah yang baik pada Rumah Tangga	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dg baik di perkotaan		11,08	-			11,08	-	
1.03.04.2,01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana prasarana persampahan yang layak pada Rumah Tangga yang terbangun	Jumlah sarana prasarana persampahan yang terbangun dg baik di perkotaan		1 unit	-			1 unit	-	
1.03.04.2,01.0 010	Pembangunan TPA / TPST / SPA / TPS-3R / TPS	Terlayannya Rumah Tangga Melalui Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	Kab.Pas	-	Rp	-		-	-	
						Belanja operasi : Rp	-				
						Belanja pegawai : Rp	-				
						Belanja barang dan jasa : Rp	-				
						Belanja bunga : Rp	-				
						Belanja subsidi : Rp	-				
						Belanja hibah : Rp	-				
						Belanja bantuan : Rp	-				
						Belanja modal : Rp	-				
						Belanja tidak terduga : Rp	-				
					Belanja transfer : Rp	-					

1.03.04.2,01.0 015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kab/Kota yg Disusun	Kab.Pas	-	Rp	-			-	
						Belanja operasi	: Rp	-			
						Belanja pegawai	: Rp	-			
						Belanja barang dan jasa	: Rp	-			
						Belanja bunga	: Rp	-			
						Belanja subsidi	: Rp	-			
						Belanja hibah	: Rp	-			
						Belanja bantuan	: Rp	-			
						Belanja modal	: Rp	-			
						Belanja tidak terduga	: Rp	-			
1.03.04.2,01.0 016						Belanja transfer	: Rp	-			
	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi		-	Rp	-			-	-
						Belanja operasi	: Rp	-			
						Belanja pegawai	: Rp	-			
						Belanja barang dan jasa	: Rp	-			
						Belanja bunga	: Rp	-			
						Belanja subsidi	: Rp	-			
						Belanja hibah	: Rp	-			
						Belanja bantuan	: Rp	-			
						Belanja modal	: Rp	-			
1.03.04.2,01.0 017						Belanja tidak terduga	: Rp	-			
						Belanja transfer	: Rp	-			
	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Tersedianya Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan	(diisi)	-	Rp	-			-	-
						Belanja operasi	: Rp	-			
						Belanja pegawai	: Rp	-			
						Belanja barang dan jasa	: Rp	-			
						Belanja bunga	: Rp	-			
						Belanja subsidi	: Rp	-			
						Belanja hibah	: Rp	-			
						Belanja bantuan	: Rp	-			
1.03.05						Belanja modal	: Rp	-			
						Belanja tidak terduga	: Rp	-			
						Belanja transfer	: Rp	-			
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Tersedianya akses sanitasi / air limbah yang layak dan aman pada Rumah Tangga	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi / air limbah domestik (layak & aman)		69,51	3.672.999.353			69,51	3.672.999.353	
1.03.05.2,01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana prasarana akses sanitasi / air limbah yang terbangun	Jumlah sarana prasarana IPAL & IPLT yang terbangun (unit)		2	3.672.999.353			2	3.672.999.353	
1.03.05.2,01.0 022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	Kab.Pas	0,15 mA3/hari	Rp	3.073.199.353			0,15 mA3/hari	3.073.199.353
						Belanja operasi	: Rp	3.073.199.353			
						Belanja pegawai	: Rp	-			

1.03.05.2.01.0 041						Belanja barang dan jasa : Rp	-				
						Belanja bunga : Rp	-				
						Belanja subsidi : Rp	-				
						Belanja hibah : Rp	3.073.199.353				
						Belanja bantuan : Rp	-				
						Belanja modal : Rp	-				
						Belanja tidak terduga : Rp	-				
						Belanja transfer : Rp	-				
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kab / Kota	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kab / Kota yang Disusun	Kab.Pas	1 dokumen	Rp	599.800.000			1 dokumen	599.800.000
						Belanja operasi : Rp	599.800.000				
						Belanja pegawai : Rp	-				
						Belanja barang dan jasa : Rp	599.800.000				
						Belanja bunga : Rp	-				
						Belanja subsidi : Rp	-				
1.03.05.2.01.0 032						Belanja hibah : Rp	-				
						Belanja bantuan : Rp	-				
						Belanja modal : Rp	-				
						Belanja tidak terduga : Rp	-				
						Belanja transfer : Rp	-				
	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Meningkatnya Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang ditingkatkan		-	Rp	-			-	-
						Belanja operasi : Rp	-				
						Belanja pegawai : Rp	-				
						Belanja barang dan jasa : Rp	-				
						Belanja bunga : Rp	-				
						Belanja subsidi : Rp	-				
						Belanja hibah : Rp	-				
						Belanja bantuan : Rp	-				
						Belanja modal : Rp	-				
						Belanja tidak terduga : Rp	-				
1.03.05.2.01.0 040						Belanja transfer : Rp	-				
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang mendapatkan Pengembangan Kapasitas	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya	Kab.Pas	-	Rp	-			-	-
						Belanja operasi : Rp	-				
						Belanja pegawai : Rp	-				
						Belanja barang dan jasa : Rp	-				
						Belanja bunga : Rp	-				
						Belanja subsidi : Rp	-				
						Belanja hibah : Rp	-				
						Belanja bantuan : Rp	-				
						Belanja modal : Rp	-				
						Belanja tidak terduga : Rp	-				
						Belanja transfer : Rp	-				
						Belanja operasi : Rp	-				
						Belanja pegawai : Rp	-				
						Belanja barang dan jasa : Rp	-				
1.03.05.2.01.0 044						Belanja bunga : Rp	-				
	Penyediaan Unit pengolahan setempat		Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher anesa	(diisi)	-	Rp	-			-	-
						Belanja operasi : Rp	-				
						Belanja pegawai : Rp	-				
						Belanja barang dan jasa : Rp	-				
						Belanja bunga : Rp	-				

1.03.08						Belanja subsidi	: Rp	-			
						Belanja hibah	: Rp	-			
						Belanja bantuan	: Rp	-			
						Belanja modal	: Rp	-			
						Belanja tidak terduga	: Rp	-			
						Belanja transfer	: Rp	-			
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Tersedianya bangunan gedung sesuai	Persentase Pembangunan Gedung yang Sesuai Dengan Peraturan Perundangan yang Berlaku		79,17			9.766.511.644		79,17	9.766.511.644
1.03.08.2,01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah	Tersedianya bangunan gedung laik fungsi	Jumlah kumulatif SLF yang diberikan		120			9.766.511.644		120	9.766.511.644
1.03.08.2,01.0 017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengubahsuaian	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	Kab.Pas	3 BG		Rp	3.988.472.844		3 BG	3.988.472.844
						Belanja operasi	: Rp	3.988.472.844			
						Belanja pegawai	: Rp	-			
						Belanja barang dan jasa	: Rp	-			
						Belanja bunga	: Rp	-			
						Belanja subsidi	: Rp	-			
						Belanja hibah	: Rp	3.988.472.844			
						Belanja bantuan	: Rp	-			
						Belanja modal	: Rp	-			
						Belanja tidak terduga	: Rp	-			
1.03.08.2,01.0 018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	Kab.Pas	2 BG		Rp	500.000.000		2 BG	500.000.000
						Belanja operasi	: Rp	-			
						Belanja pegawai	: Rp	-			
						Belanja barang dan jasa	: Rp	-			
						Belanja bunga	: Rp	-			
						Belanja subsidi	: Rp	-			
						Belanja hibah	: Rp	-			
						Belanja bantuan	: Rp	-			
						Belanja modal	: Rp	500.000.000			
						Belanja tidak terduga	: Rp	-			
1.03.08.2,01.0 019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Tersusunnya Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung		2 dok		Rp	70.000.000		2 dok	70.000.000
						Belanja operasi	: Rp	70.000.000			
						Belanja pegawai	: Rp	-			
						Belanja barang dan jasa	: Rp	70.000.000			
						Belanja bunga	: Rp	-			
						Belanja subsidi	: Rp	-			
						Belanja hibah	: Rp	-			
						Belanja bantuan	: Rp	-			
						Belanja modal	: Rp	-			
						Belanja tidak terduga	: Rp	-			
						Belanja transfer	: Rp	-			

1.03.08.2,01.0 020	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	(diisi)	-	Rp	-		-	-
						Belanja operasi	: Rp	-		
						Belanja pegawai	: Rp	-		
						Belanja barang dan jasa	: Rp	-		
						Belanja bunga	: Rp	-		
						Belanja subsidi	: Rp	-		
						Belanja hibah	: Rp	-		
						Belanja bantuan	: Rp	-		
						Belanja modal	: Rp	-		
						Belanja tidak terduga	: Rp	-		
1.03.08.2,01.0 021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Pas	3 dok	Rp	4.165.000.000		3 dok	4.165.000.000
						Belanja operasi	: Rp	4.165.000.000		
						Belanja pegawai	: Rp	-		
						Belanja barang dan jasa	: Rp	-		
						Belanja bunga	: Rp	-		
						Belanja subsidi	: Rp	-		
						Belanja hibah	: Rp	4.165.000.000		
						Belanja bantuan	: Rp	-		
						Belanja modal	: Rp	-		
						Belanja tidak terduga	: Rp	-		
1.03.08.2,01.0 023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Kab.Pas	120 dok	Rp	1.043.038.800		120 dok	1.043.038.800
						Belanja operasi	: Rp	1.043.038.800		
						Belanja pegawai	: Rp	-		
						Belanja barang dan jasa	: Rp	1.043.038.800		
						Belanja bunga	: Rp	-		
						Belanja subsidi	: Rp	-		
						Belanja hibah	: Rp	-		
						Belanja bantuan	: Rp	-		
						Belanja modal	: Rp	-		
						Belanja tidak terduga	: Rp	-		
					Belanja transfer	: Rp	-			

1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Tercapainya penataan bangunan dan lingkungan yang mantap	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Mantap		100	1.750.000.000			100	1.750.000.000
1.03.09.2,01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis	jumlah bangunan yang direvitalisasi setiap tahun		1	1.750.000.000			1	1.750.000.000
1.03.09.2.01.0011	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Tertatanya Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	Kab.Pas	1 kawasan	Rp1.750.000.000			1 kawasan	1.750.000.000
						Belanja operasi : Rp	-			
						Belanja pegawai : Rp	-			
						Belanja barang dan jasa : Rp	-			
						Belanja bunga : Rp	-			
						Belanja subsidi : Rp	-			
						Belanja hibah : Rp	-			
						Belanja bantuan : Rp	-			
						Belanja modal : Rp	1.750.000.000			
						Belanja tidak terduga : Rp	-			
						Belanja transfer : Rp	-			
	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Pas	1 dok	Rp-			1 dok	-
						Belanja operasi : Rp	-			
						Belanja pegawai : Rp	-			
						Belanja barang dan jasa : Rp	-			
						Belanja bunga : Rp	-			
						Belanja subsidi : Rp	-			
						Belanja hibah : Rp	-			
						Belanja bantuan : Rp	-			
						Belanja modal : Rp	-			
						Belanja tidak terduga : Rp	-			
						Belanja transfer : Rp	-			
(diisi)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang		65	3.483.621.925			65	3.483.621.925
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW dan Rencana Rinci Tata Ruang RRTR	Persentase RTR (RTRW dan RDTR) yang ditetapkan	Persentase RTR (RTRW dan RDTR) yang ditetapkan		100,00	134.874.600			100,00	134.874.600
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	Kab.Pas	2 dok	Rp-			2 dok	-
						Belanja operasi : Rp	-			
						Belanja pegawai : Rp	-			
						Belanja barang dan jasa : Rp	-			
						Belanja bunga : Rp	-			
						Belanja subsidi : Rp	-			
						Belanja hibah : Rp	-			
						Belanja bantuan : Rp	-			
						Belanja modal : Rp	-			

					Belanja tidak terduga : Rp	-				
					Belanja transfer : Rp	-				
Pelaksanaan Fasilitas RDTR Kabupaten/Kota	Terpenuhinya dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitas	dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitas	Kab.Pas	2 dok	Rp	-			2 dok	-
					Belanja operasi : Rp	-				
					Belanja pegawai : Rp	-				
					Belanja barang dan jasa : Rp	-				
					Belanja bunga : Rp	-				
					Belanja subsidi : Rp	-				
					Belanja hibah : Rp	-				
					Belanja bantuan : Rp	-				
					Belanja modal : Rp	-				
					Belanja tidak terduga : Rp	-				
					Belanja transfer : Rp	-				
Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota		dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi		1 dok	Rp	-			1 dok	-
					Belanja operasi : Rp	-				
					Belanja pegawai : Rp	-				
					Belanja barang dan jasa : Rp	-				
					Belanja bunga : Rp	-				
					Belanja subsidi : Rp	-				
					Belanja hibah : Rp	-				
					Belanja bantuan : Rp	-				
					Belanja modal : Rp	-				
					Belanja tidak terduga : Rp	-				
					Belanja transfer : Rp	-				
Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Tersedianya Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota		2 dok	Rp	-			2 dok	-
					Belanja operasi : Rp	-				
					Belanja pegawai : Rp	-				
					Belanja barang dan jasa : Rp	-				
					Belanja bunga : Rp	-				
					Belanja subsidi : Rp	-				
					Belanja hibah : Rp	-				
					Belanja bantuan : Rp	-				
					Belanja modal : Rp	-				
					Belanja tidak terduga : Rp	-				
					Belanja transfer : Rp	-				
Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	(diisi)	4 laporan	Rp	134.874.600			4 laporan	134.874.600
					Belanja operasi : Rp	134.874.600				
					Belanja pegawai : Rp	-				
					Belanja barang dan jasa : Rp	134.874.600				
					Belanja bunga : Rp	-				
					Belanja subsidi : Rp	-				
					Belanja hibah : Rp	-				
					Belanja bantuan : Rp	-				
					Belanja modal : Rp	-				
					Belanja tidak terduga : Rp	-				
					Belanja transfer : Rp	-				
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas RTR yang disusun	Persentase Rencana Tata Ruang yang disusun		22,22		1.992.913.540			22,22222222	1.992.913.540

Penyusunan Peta Dasar	Tersedianya orthorektifikasi citra dari raw citra ke format ECW dan tersedianya data SHP Peta Dasar	Jumlah data SHP Peta Dasar	Kab.Pas	2 peta	Rp813.844.000			2 peta	813.844.000
					Belanja operasi : Rp813.844.000				
					Belanja pegawai : Rp-				
					Belanja barang dan jasa : Rp813.844.000				
					Belanja bunga : Rp-				
					Belanja subsidi : Rp-				
					Belanja hibah : Rp-				
					Belanja bantuan : Rp-				
					Belanja modal : Rp-				
					Belanja tidak terduga : Rp-				
					Belanja transfer : Rp-				
Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Tersedianya materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	Kab.Pas	2 dok	Rp-			2 dok	-
					Belanja operasi : Rp-				
					Belanja pegawai : Rp-				
					Belanja barang dan jasa : Rp-				
					Belanja bunga : Rp-				
					Belanja subsidi : Rp-				
					Belanja hibah : Rp-				
					Belanja bantuan : Rp-				
					Belanja modal : Rp-				
					Belanja tidak terduga : Rp-				
					Belanja transfer : Rp-				
Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang	Terlaksananya kegiatan peningkatan kualitas SDM perencanaan tata ruang	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan		5 org	Rp60.000.000			5 org	60.000.000
					Belanja operasi : Rp60.000.000				
					Belanja pegawai : Rp-				
					Belanja barang dan jasa : Rp60.000.000				
					Belanja bunga : Rp-				
					Belanja subsidi : Rp-				
					Belanja hibah : Rp-				
					Belanja bantuan : Rp-				
					Belanja modal : Rp-				
					Belanja tidak terduga : Rp-				
					Belanja transfer : Rp-				
Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Tersedianya materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota	(diisi)	1 dok	Rp1.119.069.540			1 dok	1.119.069.540
					Belanja operasi : Rp1.119.069.540				
					Belanja pegawai : Rp-				
					Belanja barang dan jasa : Rp1.119.069.540				
					Belanja bunga : Rp-				
					Belanja subsidi : Rp-				
					Belanja hibah : Rp-				
					Belanja bantuan : Rp-				
					Belanja modal : Rp-				
					Belanja tidak terduga : Rp-				
					Belanja transfer : Rp-				
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi Pemanfaatan Ruang	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan		5,00	594.370.435			5	594.370.435
Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Terlaksananya kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang untuk meningkatkan kerja sama antarpemangku kepentingan	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Kab.Pas	2 dok	Rp109.993.000			2 dok	109.993.000

					Belanja operasi : Rp	109.993.000				
					Belanja pegawai : Rp	-				
					Belanja barang dan jasa : Rp	109.993.000				
					Belanja bunga : Rp	-				
					Belanja subsidi : Rp	-				
					Belanja hibah : Rp	-				
					Belanja bantuan : Rp	-				
					Belanja modal : Rp	-				
					Belanja tidak terduga : Rp	-				
					Belanja transfer : Rp	-				
Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Terlayannya permohonan dokumen Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku yaitu 20 hari	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	Kab.Pas	10 layanan	Rp	484.377.435			10 layanan	484.377.435
					Belanja operasi : Rp	484.377.435				
					Belanja pegawai : Rp	-				
					Belanja barang dan jasa : Rp	484.377.435				
					Belanja bunga : Rp	-				
					Belanja subsidi : Rp	-				
					Belanja hibah : Rp	-				
					Belanja bantuan : Rp	-				
					Belanja modal : Rp	-				
					Belanja tidak terduga : Rp	-				
					Belanja transfer : Rp	-				
Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Tersedia dan terlaksananya pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang		1 SI	Rp	-			1 SI	-
					Belanja operasi : Rp	-				
					Belanja pegawai : Rp	-				
					Belanja barang dan jasa : Rp	-				
					Belanja bunga : Rp	-				
					Belanja subsidi : Rp	-				
					Belanja hibah : Rp	-				
					Belanja bantuan : Rp	-				
					Belanja modal : Rp	-				
					Belanja tidak terduga : Rp	-				
					Belanja transfer : Rp	-				
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Prosentase Pengendalian Pemanfaatan Ruang Yang dilaksanakan		33,00		761.463.350			33	761.463.350
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kab.Pas	5 dok	Rp	52.561.350			5 dok	52.561.350
					Belanja operasi : Rp	52.561.350				
					Belanja pegawai : Rp	-				
					Belanja barang dan jasa : Rp	52.561.350				
					Belanja bunga : Rp	-				
					Belanja subsidi : Rp	-				
					Belanja hibah : Rp	-				
					Belanja bantuan : Rp	-				
					Belanja modal : Rp	-				
					Belanja tidak terduga : Rp	-				
					Belanja transfer : Rp	-				

	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Kab.Pas	20 dok	Rp 119.972.000		20 dok	119.972.000
						Belanja operasi : Rp 119.972.000			
						Belanja pegawai : Rp -			
						Belanja barang dan jasa : Rp 119.972.000			
						Belanja bunga : Rp -			
						Belanja subsidi : Rp -			
						Belanja hibah : Rp -			
						Belanja bantuan : Rp -			
						Belanja modal : Rp -			
						Belanja tidak terduga : Rp -			
						Belanja transfer : Rp -			
	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Terlaksananya Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang		3 laporan	Rp 588.930.000		3 laporan	588.930.000
						Belanja operasi : Rp 588.930.000			
						Belanja pegawai : Rp -			
						Belanja barang dan jasa : Rp 588.930.000			
						Belanja bunga : Rp -			
						Belanja subsidi : Rp -			
						Belanja hibah : Rp -			
						Belanja bantuan : Rp -			
						Belanja modal : Rp -			
						Belanja tidak terduga : Rp -			
						Belanja transfer : Rp -			
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya administrasi tata kelola PD dengan baik	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi		100%	12.420.673.955		1	12.420.673.955
1.03.01.2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dok perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang selaras	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan pada dok rencana, anggaran, dan evaluasi		1,00	149.747.500		1	149.747.500
1.03.01.2,01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab.Pas	3 dok	Rp 12.000.000		3 dok	12.000.000
						Belanja operasi : Rp 12.000.000			
						Belanja pegawai : Rp -			
						Belanja barang dan jasa : Rp 12.000.000			
						Belanja bunga : Rp -			
						Belanja subsidi : Rp -			
						Belanja hibah : Rp -			
						Belanja bantuan : Rp -			
						Belanja modal : Rp -			
						Belanja tidak terduga : Rp -			
						Belanja transfer : Rp -			
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab.Pas	6 dok	Rp 15.000.000		6 dok	15.000.000
						Belanja operasi : Rp 15.000.000			
						Belanja pegawai : Rp -			
						Belanja barang dan jasa : Rp 15.000.000			
						Belanja bunga : Rp -			
						Belanja subsidi : Rp -			

1.03.01.2,01.0 010						Belanja hibah	: Rp	-				
						Belanja bantuan	: Rp	-				
						Belanja modal	: Rp	-				
						Belanja tidak terduga	: Rp	-				
						Belanja transfer	: Rp	-				
	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 BA		Rp	92.500.000			1 BA	92.500.000
						Belanja operasi	: Rp	92.500.000				
						Belanja pegawai	: Rp	-				
						Belanja barang dan jasa	: Rp	92.500.000				
						Belanja bunga	: Rp	-				
						Belanja subsidi	: Rp	-				
						Belanja hibah	: Rp	-				
						Belanja bantuan	: Rp	-				
						Belanja modal	: Rp	-				
						Belanja tidak terduga	: Rp	-				
						Belanja transfer	: Rp	-				
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	(diisi)	6 laporan		Rp	30.247.500			6 laporan	30.247.500
						Belanja operasi	: Rp	30.247.500				
						Belanja pegawai	: Rp	-				
						Belanja barang dan jasa	: Rp	30.247.500				
						Belanja bunga	: Rp	-				
						Belanja subsidi	: Rp	-				
						Belanja hibah	: Rp	-				
						Belanja bantuan	: Rp	-				
						Belanja modal	: Rp	-				
						Belanja tidak terduga	: Rp	-				
						Belanja transfer	: Rp	-				
1.03.01.2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya laporan keuangan yang akurat	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggung - jawabkan		1,00			9.796.424.000			1	9.796.424.000
1.03.01.2,02.0 001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Pas	100 org/bln		Rp	9.556.184.000			100 org/bln	9.556.184.000
						Belanja operasi	: Rp	9.556.184.000				
						Belanja pegawai	: Rp	9.556.184.000				
						Belanja barang dan jasa	: Rp	-				
						Belanja bunga	: Rp	-				
						Belanja subsidi	: Rp	-				
						Belanja hibah	: Rp	-				
						Belanja bantuan	: Rp	-				
						Belanja modal	: Rp	-				
						Belanja tidak terduga	: Rp	-				
						Belanja transfer	: Rp	-				
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab.Pas	170 dok		Rp	240.240.000			170 dok	240.240.000
						Belanja operasi	: Rp	240.240.000				
1.03.01.2,02.0 002						Belanja pegawai	: Rp	240.240.000				
						Belanja barang dan jasa	: Rp	-				
						Belanja bunga	: Rp	-				
						Belanja subsidi	: Rp	-				
						Belanja hibah	: Rp	-				

1.03.01.2,03.002	1.03.01.2,03					Belanja hibah : Rp	-			
						Belanja bantuan : Rp	-			
						Belanja modal : Rp	-			
						Belanja tidak terduga : Rp	-			
						Belanja transfer : Rp	-			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya pengelolaan BMD dengan baik	Persentase laporan / dokumen BMD yg akurat dan sesuai dengan ketentuan	1,00		156.360.000		1	156.360.000
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab.Pas	12 dok	Rp 156.360.000		12 dok	156.360.000
						Belanja operasi : Rp	156.360.000			
						Belanja pegawai : Rp	-			
						Belanja barang dan jasa	156.360.000			
						Belanja bunga : Rp	-			
						Belanja subsidi : Rp	-			
						Belanja hibah : Rp	-			
						Belanja bantuan : Rp	-			
						Belanja modal : Rp	-			
						Belanja tidak terduga : Rp	-			
						Belanja transfer : Rp	-			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian dengan baik	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	1,00		100.697.400		1	100.697.400
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab.Pas	271 org	Rp 50.192.400		271 org	50.192.400
						Belanja operasi : Rp	50.192.400			
						Belanja pegawai : Rp	-			
1.03.01.2,05.011	1.03.01.2,05.010					Belanja barang dan jasa	50.192.400			
						Belanja bunga : Rp	-			
						Belanja subsidi : Rp	-			
						Belanja hibah : Rp	-			
						Belanja bantuan : Rp	-			
						Belanja modal : Rp	-			
						Belanja tidak terduga : Rp	-			
						Belanja transfer : Rp	-			
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab.Pas	50 org	Rp 50.505.000		50 org	50.505.000
						Belanja operasi : Rp	50.505.000			
						Belanja pegawai : Rp	-			
						Belanja barang dan jasa	50.505.000			
						Belanja bunga : Rp	-			
						Belanja subsidi : Rp	-			
						Belanja hibah : Rp	-			
						Belanja bantuan : Rp	-			
						Belanja modal : Rp	-			
						Belanja tidak terduga : Rp	-			
						Belanja transfer : Rp	-			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan umum perangkat daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	1,00		355.943.860		1	355.943.860
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab.Pas	0	Rp 83.031.310		0	83.031.310
1.03.01.2,06.004						Belanja operasi : Rp	83.031.310			
						Belanja pegawai : Rp	-			
						Belanja barang dan jasa	83.031.310			
						Belanja bunga : Rp	-			

1.03.01.2,06.005						Belanja subsidi	: Rp	-				
						Belanja hibah	: Rp	-				
						Belanja bantuan	: Rp	-				
						Belanja modal	: Rp	-				
						Belanja tidak terduga	: Rp	-				
						Belanja transfer	: Rp	-				
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab.Pas	0	Rp		59.723.550			0	59.723.550
						Belanja operasi	: Rp	59.723.550				
						Belanja pegawai	: Rp	-				
						Belanja barang dan jasa	: Rp	59.723.550				
						Belanja bunga	: Rp	-				
						Belanja subsidi	: Rp	-				
						Belanja hibah	: Rp	-				
						Belanja bantuan	: Rp	-				
						Belanja modal	: Rp	-				
						Belanja tidak terduga	: Rp	-				
						Belanja transfer	: Rp	-				
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 Laporan	Rp		33.189.000			12 Laporan	33.189.000
1.03.01.2,06.008						Belanja operasi	: Rp	33.189.000				
						Belanja pegawai	: Rp	-				
						Belanja barang dan jasa	: Rp	33.189.000				
						Belanja bunga	: Rp	-				
						Belanja subsidi	: Rp	-				
						Belanja hibah	: Rp	-				
						Belanja bantuan	: Rp	-				
						Belanja modal	: Rp	-				
						Belanja tidak terduga	: Rp	-				
						Belanja transfer	: Rp	-				
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD	(diisi)	12 Laporan	Rp		180.000.000			12 Laporan	180.000.000
						Belanja operasi	: Rp	180.000.000				
						Belanja pegawai	: Rp	-				
						Belanja barang dan jasa	: Rp	180.000.000				
						Belanja bunga	: Rp	-				
						Belanja subsidi	: Rp	-				
						Belanja hibah	: Rp	-				
						Belanja bantuan	: Rp	-				
						Belanja modal	: Rp	-				
						Belanja tidak terduga	: Rp	-				
						Belanja transfer	: Rp	-				
1.03.01.2,07.002	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Terlaksananya pengadaan BMD	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi		1,00			693.796.054			1	693.796.054
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab.Pas	4 unit	Rp		111.000.000			4 unit	111.000.000
						Belanja operasi	: Rp	111.000.000				
						Belanja pegawai	: Rp	-				
						Belanja barang dan jasa	: Rp	111.000.000				
						Belanja bunga	: Rp	-				
						Belanja subsidi	: Rp	-				
						Belanja hibah	: Rp	-				
						Belanja bantuan	: Rp	-				
						Belanja modal	: Rp	-				
						Belanja tidak terduga	: Rp	-				
						Belanja transfer	: Rp	-				
						Belanja operasi	: Rp	111.000.000				
						Belanja pegawai	: Rp	-				
						Belanja barang dan jasa	: Rp	111.000.000				
						Belanja bunga	: Rp	-				
						Belanja subsidi	: Rp	-				
						Belanja hibah	: Rp	-				
						Belanja bantuan	: Rp	-				
						Belanja modal	: Rp	-				
						Belanja tidak terduga	: Rp	-				

1.03.01.2,07.0005						Belanja transfer : Rp -					
	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab.Pas	1 paket	Rp 377.790.054			1 paket	377.790.054	
						Belanja operasi : Rp 377.790.054					
						Belanja pegawai : Rp -					
						Belanja barang dan jasa : Rp 377.790.054					
						Belanja bunga : Rp -					
						Belanja subsidi : Rp -					
						Belanja hibah : Rp -					
						Belanja bantuan : Rp -					
						Belanja modal : Rp -					
1.03.01.2,07.0010						Belanja tidak terduga : Rp -					
						Belanja transfer : Rp -					
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		8 unit	Rp 205.006.000			8 unit	205.006.000	
						Belanja operasi : Rp 205.006.000					
						Belanja pegawai : Rp -					
						Belanja barang dan jasa : Rp 205.006.000					
						Belanja bunga : Rp -					
						Belanja subsidi : Rp -					
						Belanja hibah : Rp -					
1.03.01.2,08						Belanja bantuan : Rp -					
						Belanja modal : Rp -					
						Belanja tidak terduga : Rp -					
						Belanja transfer : Rp -					
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya penunjang operasional kantor	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia		100%	511.441.175			1	511.441.175	
	1.03.01.2,08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab.Pas	12 Laporan	Rp 150.050.000			12 Laporan	150.050.000
							Belanja operasi : Rp 150.050.000				
							Belanja pegawai : Rp -				
							Belanja barang dan jasa : Rp 150.050.000				
						Belanja bunga : Rp -					
						Belanja subsidi : Rp -					
						Belanja hibah : Rp -					
						Belanja bantuan : Rp -					
						Belanja modal : Rp -					
1.03.01.2,08.0003						Belanja tidak terduga : Rp -					
						Belanja transfer : Rp -					
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab.Pas	12 Laporan	Rp 74.727.975			12 Laporan	74.727.975	
						Belanja operasi : Rp 74.727.975					
						Belanja pegawai : Rp -					
						Belanja barang dan jasa : Rp 74.727.975					
						Belanja bunga : Rp -					
						Belanja subsidi : Rp -					
						Belanja hibah : Rp -					

1.03.01.2,08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	Rp	286.663.200			12 Laporan	286.663.200
						Belanja operasi	: Rp 286.663.200				
						Belanja pegawai	: Rp -				
						Belanja barang dan jasa	: Rp 286.663.200				
						Belanja bunga	: Rp -				
						Belanja subsidi	: Rp -				
						Belanja hibah	: Rp -				
						Belanja bantuan	: Rp -				
						Belanja modal	: Rp -				
						Belanja tidak terduga	: Rp -				
						Belanja transfer	: Rp -				
	1.03.01.2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Tersedianya BMD yang dapat beroperasi dengan baik	Persentase BMD kondisi baik	100%		656.263.966			1	656.263.966
	1.03.01.2,09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab.Pas	1 unit	Rp	166.933.966		1 unit	166.933.966
						Belanja operasi	: Rp 166.933.966				
						Belanja pegawai	: Rp -				
						Belanja barang dan jasa	: Rp 166.933.966				
						Belanja bunga	: Rp -				
						Belanja subsidi	: Rp -				
						Belanja hibah	: Rp -				
						Belanja bantuan	: Rp -				
						Belanja modal	: Rp -				
						Belanja tidak terduga	: Rp -				
						Belanja transfer	: Rp -				
	1.03.01.2,09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab.Pas	50 unit	Rp	399.330.000		50 unit	399.330.000
						Belanja operasi	: Rp 399.330.000				
						Belanja pegawai	: Rp -				
						Belanja barang dan jasa	: Rp 399.330.000				
						Belanja bunga	: Rp -				
						Belanja subsidi	: Rp -				
						Belanja hibah	: Rp -				
						Belanja bantuan	: Rp -				
						Belanja modal	: Rp -				
						Belanja tidak terduga	: Rp -				
						Belanja transfer	: Rp -				
	1.03.01.2,09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Kab.Pas	12 unit	Rp	90.000.000		12 unit	90.000.000
						Belanja operasi	: Rp 90.000.000				
						Belanja pegawai	: Rp -				
						Belanja barang dan jasa	: Rp 90.000.000				
						Belanja bunga	: Rp -				
						Belanja subsidi	: Rp -				
						Belanja hibah	: Rp -				
						Belanja bantuan	: Rp -				
						Belanja modal	: Rp -				
						Belanja tidak terduga	: Rp -				

						Belanja transfer	:	Rp	-				
						Total Belanja operasi	:	Rp	41.050.119.153				
						Belanja pegawai	:	Rp	9.796.424.000				
						Belanja barang dan	:	Rp	8.440.310.680				
						Belanja bunga	:	Rp	-				
						Belanja subsidi	:	Rp	-				
						Belanja hibah	:	Rp	22.813.384.474				
						Belanja bantuan	:	Rp	-				
						Total Belanja modal	:	Rp	2.250.000.000				
						Total Belanja tidak terduga	:	Rp	-				
						Total Belanja transfer	:	Rp	-				
						Total Belanja PD	:	Rp	43.300.119.153,4				